



**BUPATI TANGGAMUS
PROVINSI LAMPUNG**

KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS
NOMOR: B.233/15/08/2023

TENTANG
PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur yang menggambarkan tata hubungan kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur antar unit organisasi, perlu dilakukan penyusunan peta proses bisnis Pemerintah Kabupaten Tanggamus;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan peta proses bisnis dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Tanggamus;

Mengingat...

- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tanggamus ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6400);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5318);

MEMUTUSKAN:

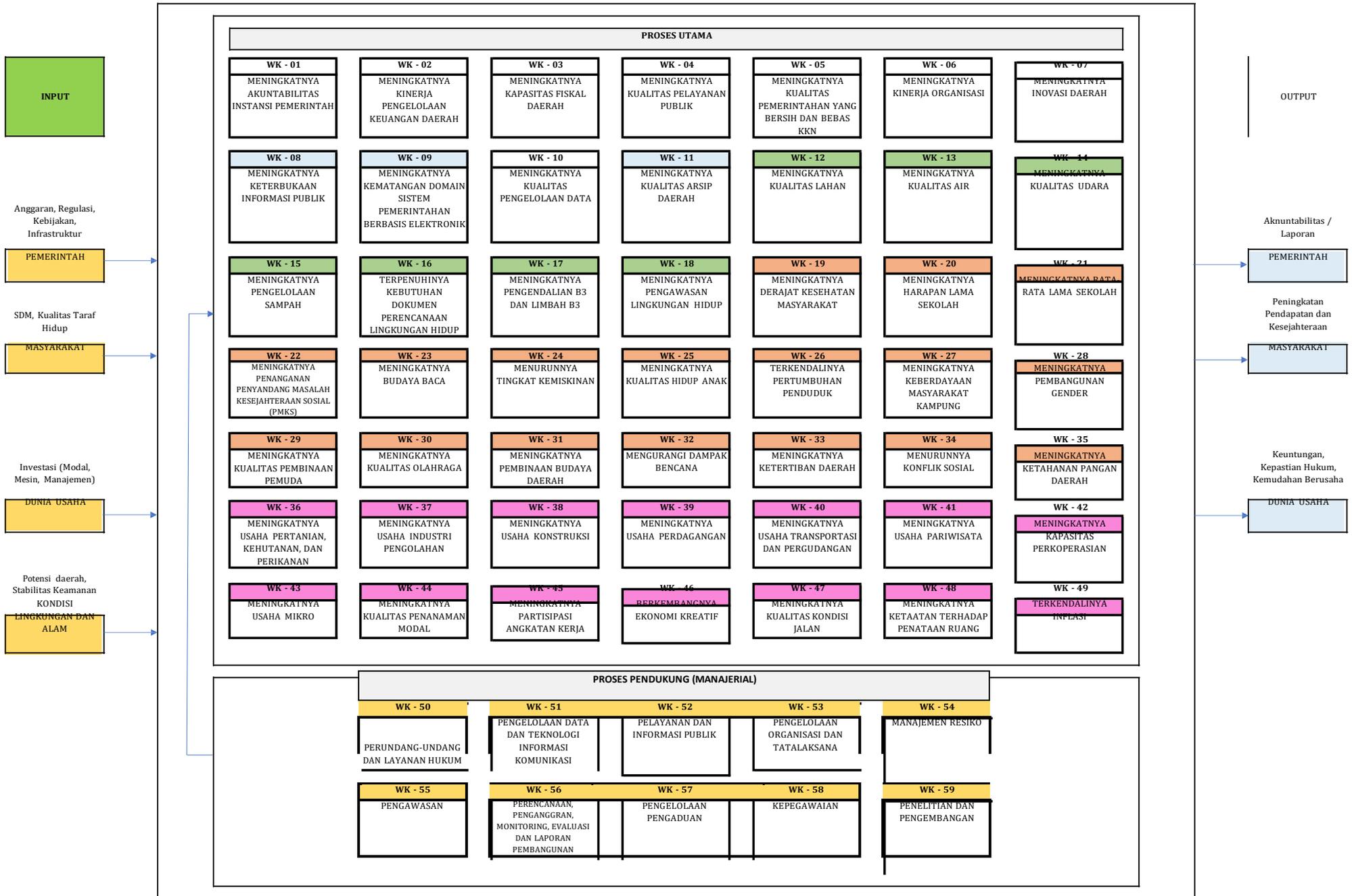
- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TANGGAMUS TENTANG PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS
- KESATU : Menetapkan Peta Proses Bisnis Pemerinah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Proses Bisnis yang meliputi Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, Peta Sub Proses, serta Peta Lintas Fungsi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun berdasarkan hubungan kerja antar Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi, untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, digunakan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus dalam mewujudkan hubungan kerja yang efektif dan efisien.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Terhadap dokumen peta proses bisnis sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilakukan evaluasi dan pemantauan relevansi dan efektivitasnya oleh Tim Penyusun Peta Proses Bisnis Kabupaten Tanggamus, paling sedikit satu tahun sekali.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 26 Juni 2022

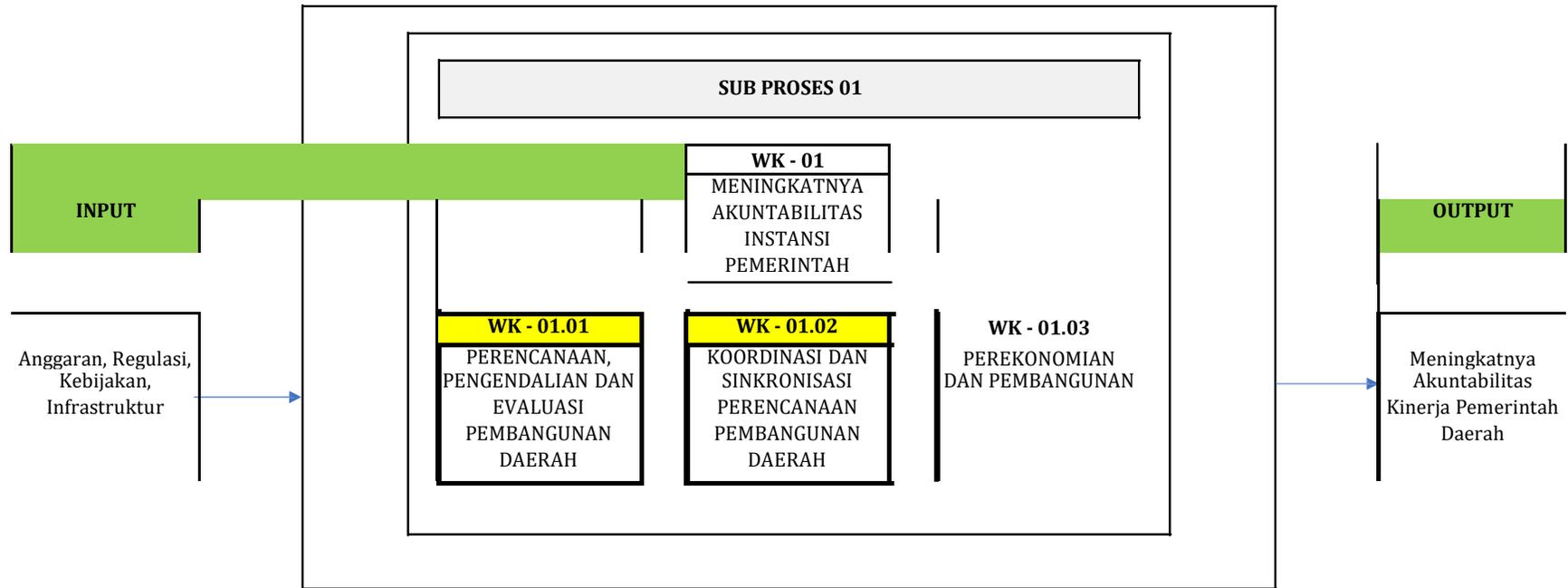
The official seal of the Bupati of Tanggamus, featuring a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text 'BUPATI TANGGAMUS' and 'TANGGAMUS' at the bottom.
BUPATI TANGGAMUS,

DEWI HANDAJANI

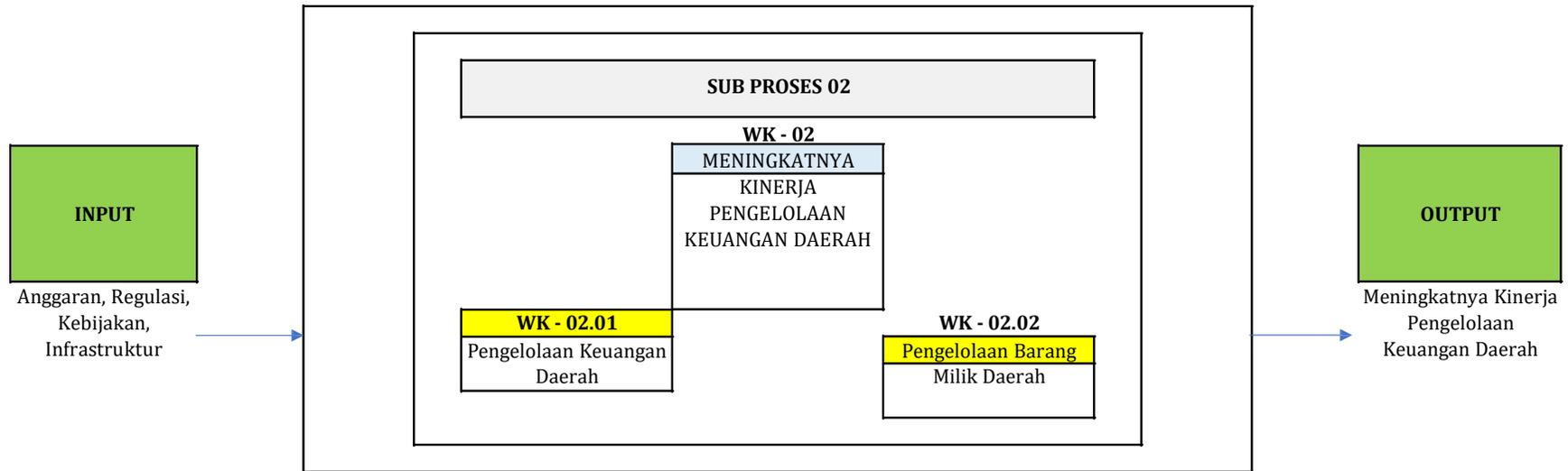
PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS



PETA SUB PROSES TUJUAN 1



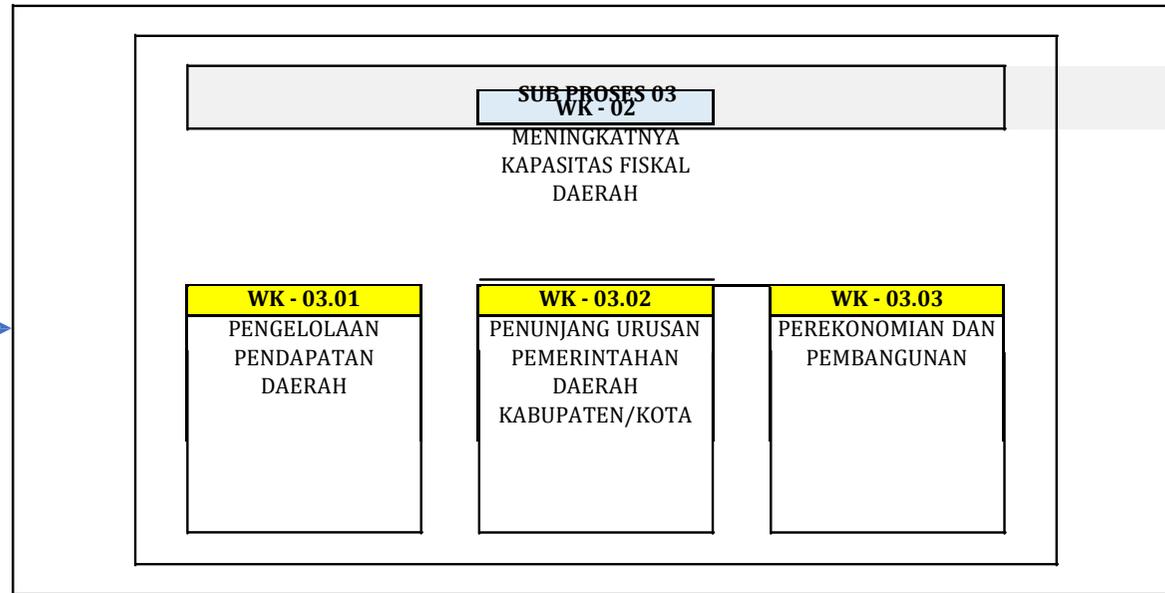
PETA SUB PROSES TUJUAN 1





INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur



OUTPUT

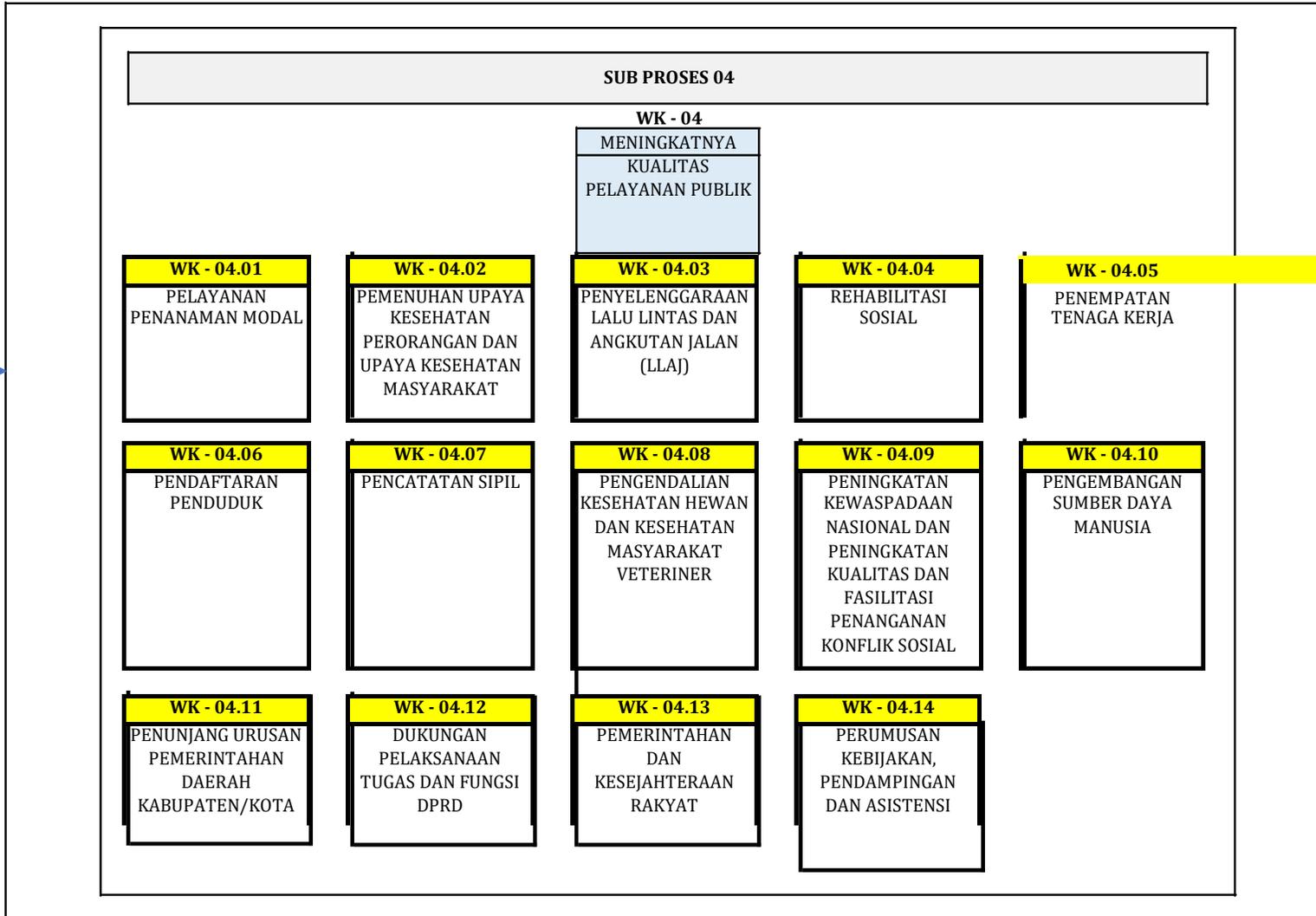
MENINGKATNYA
KAPASITAS FISKAL
DAERAH





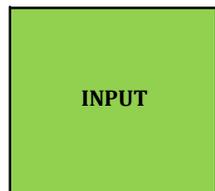
INPUT

Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur

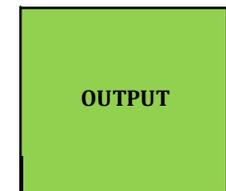
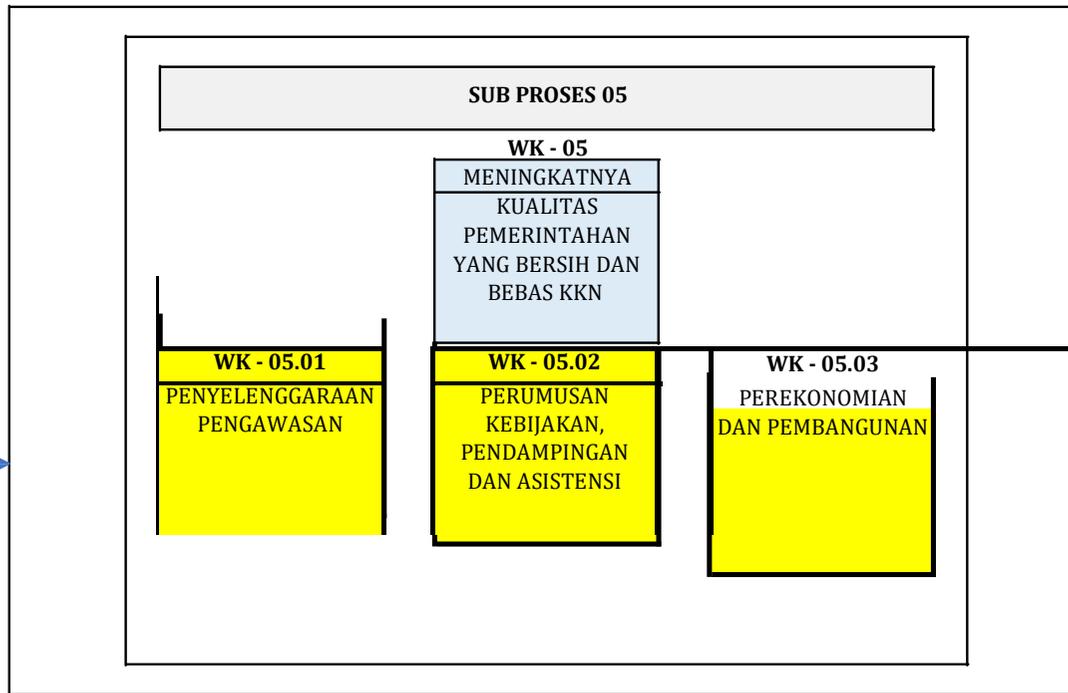


OUTPUT

MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK



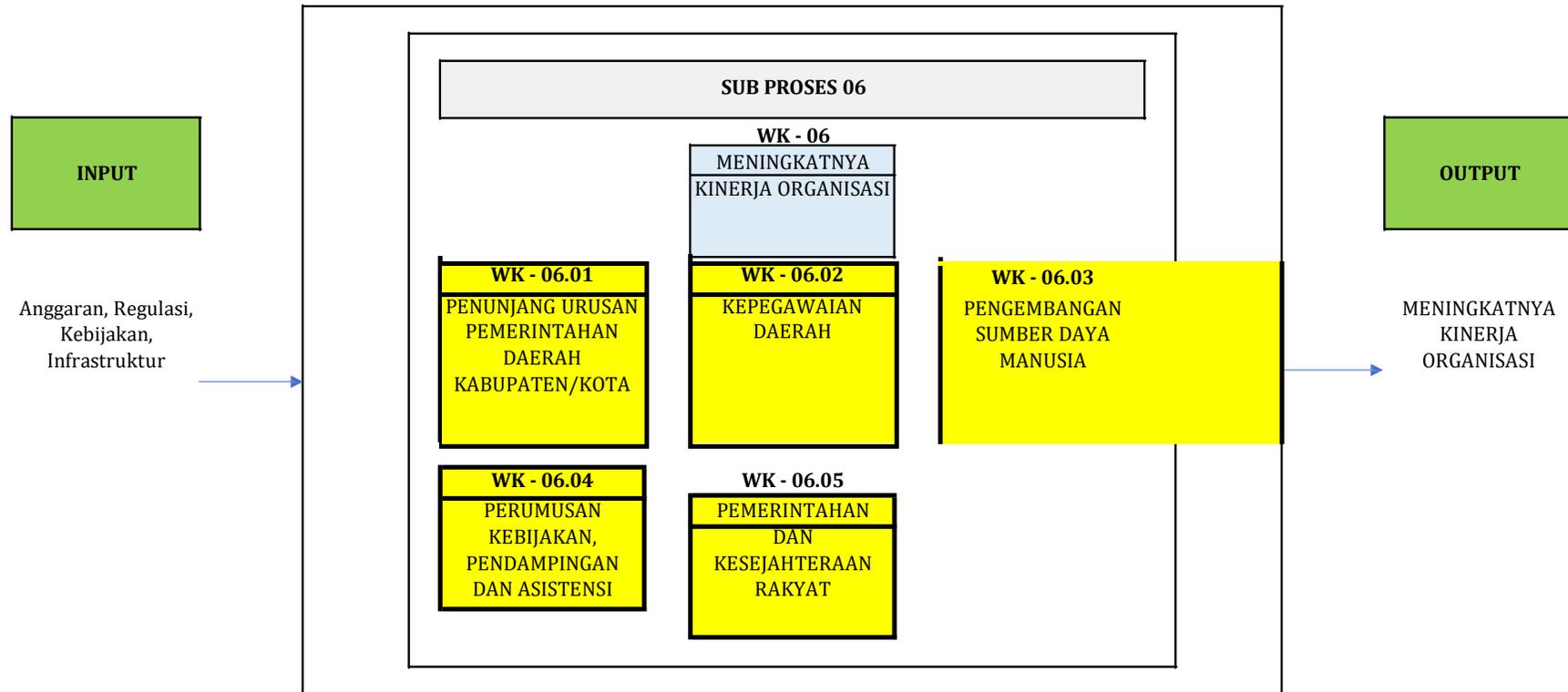
Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur



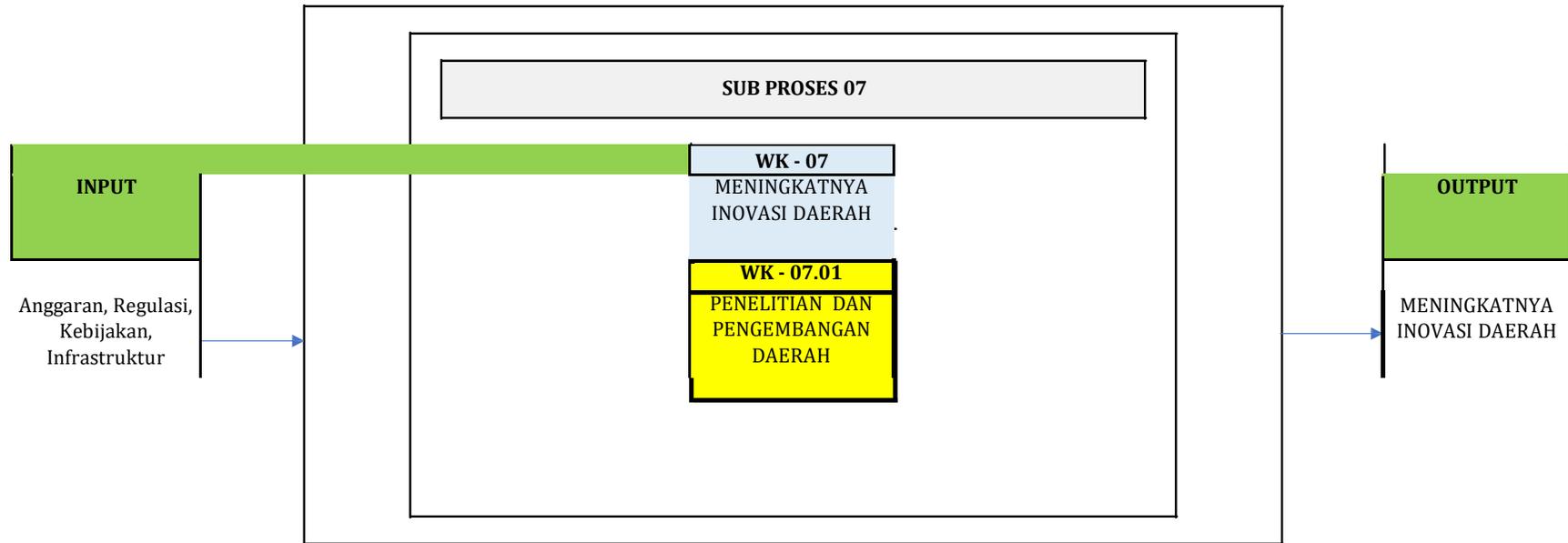
MENINGKATNYA
KUALITAS
PEMERINTAHAN
YANG BERSIH DAN
BEBAS KKN



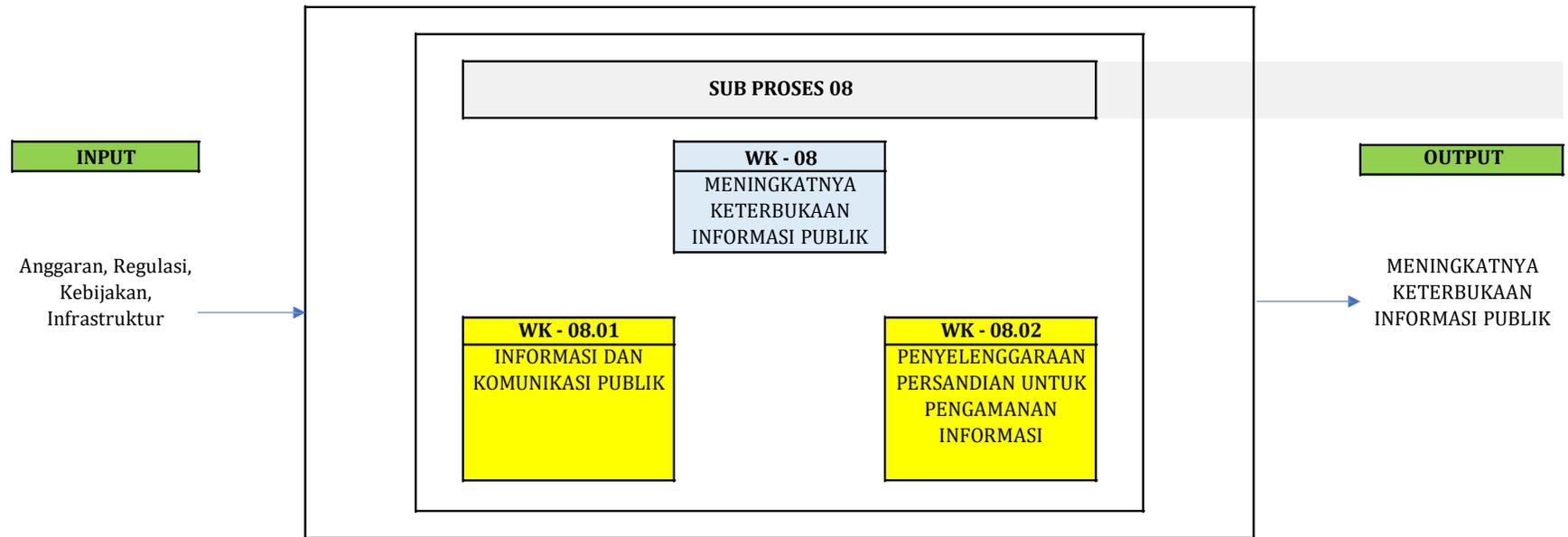
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



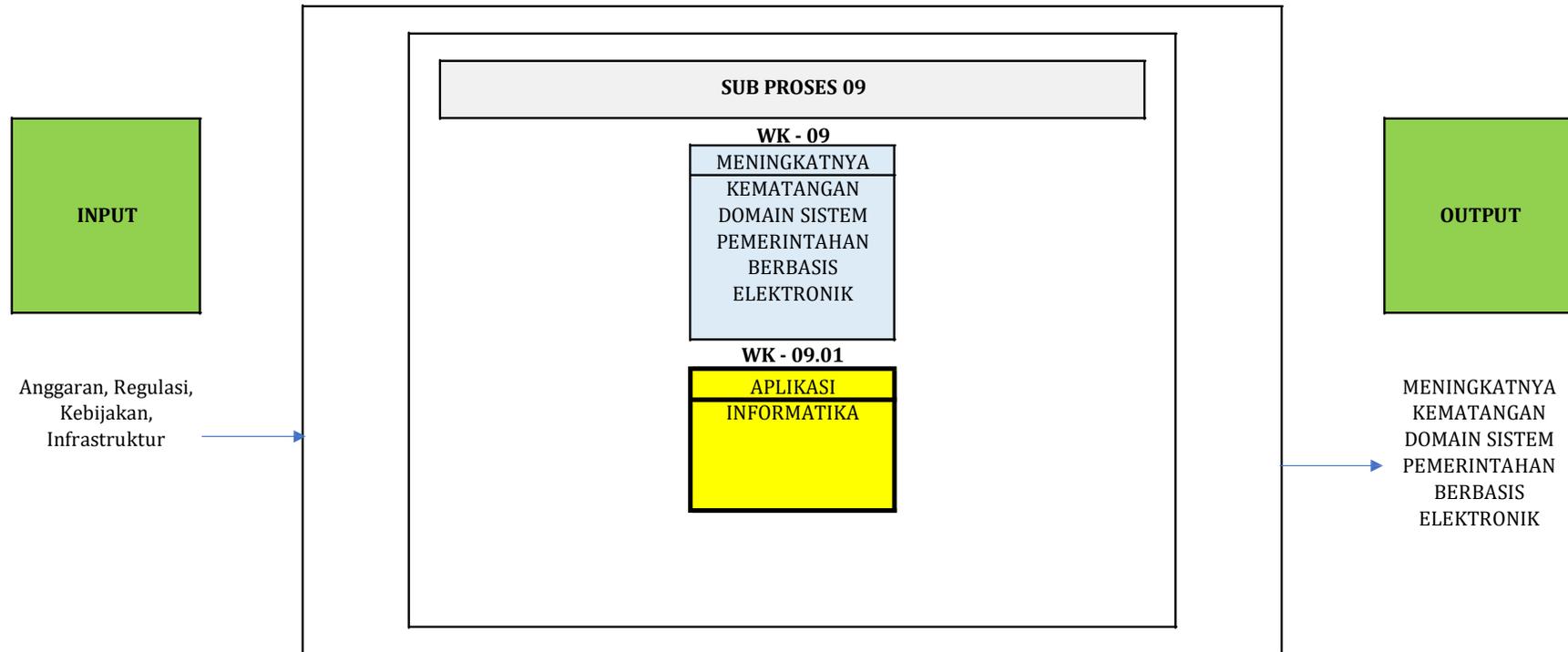
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



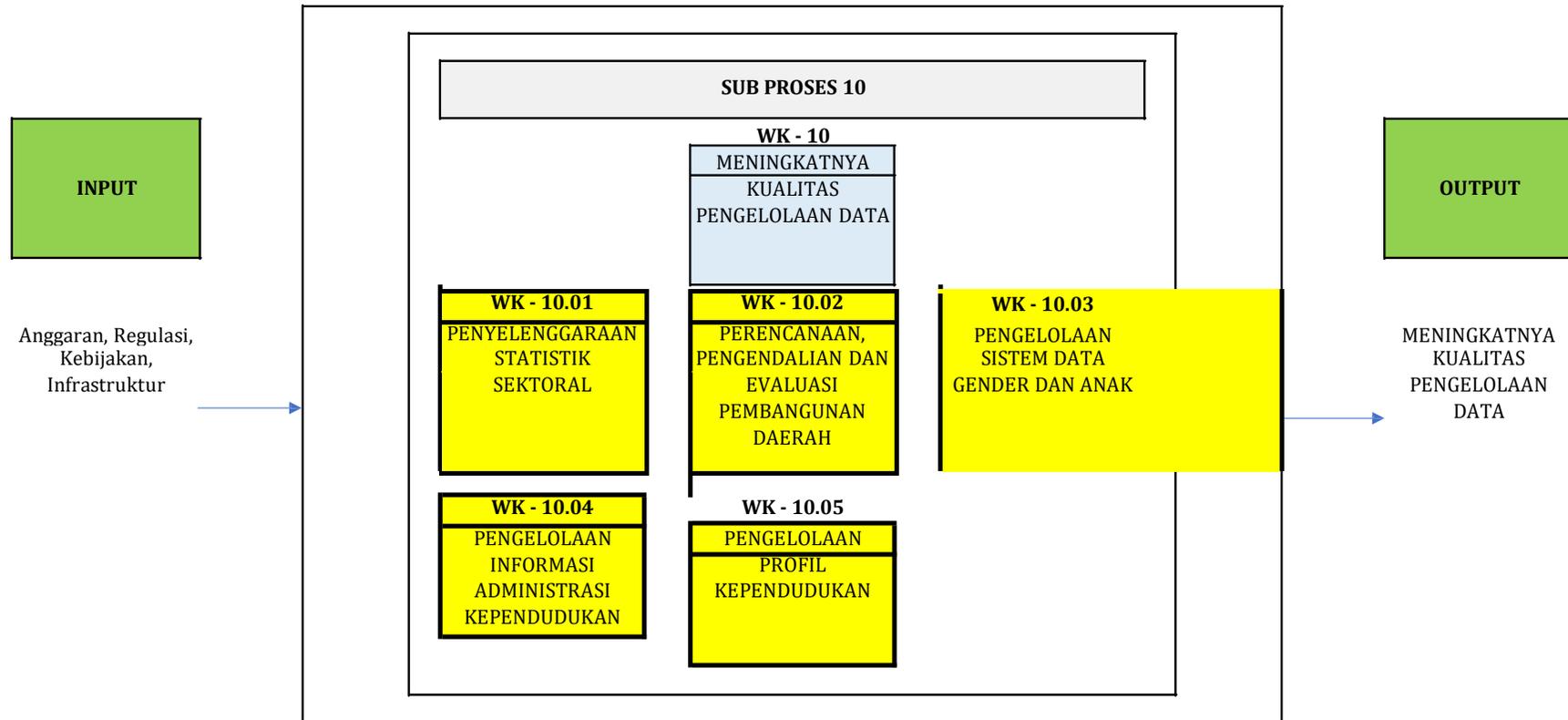
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



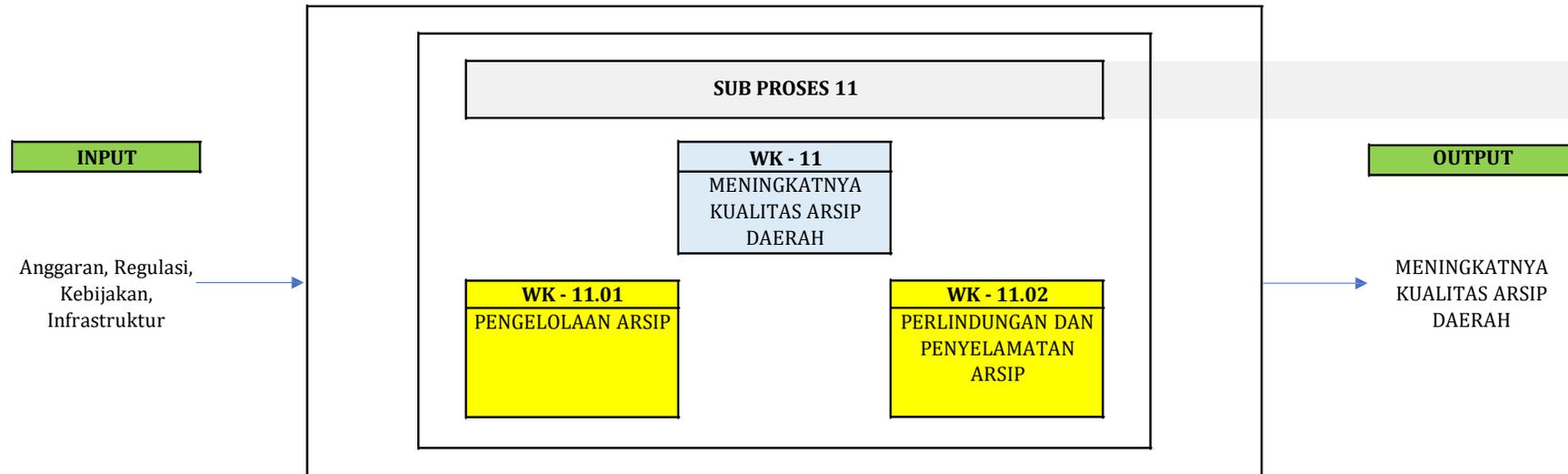
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



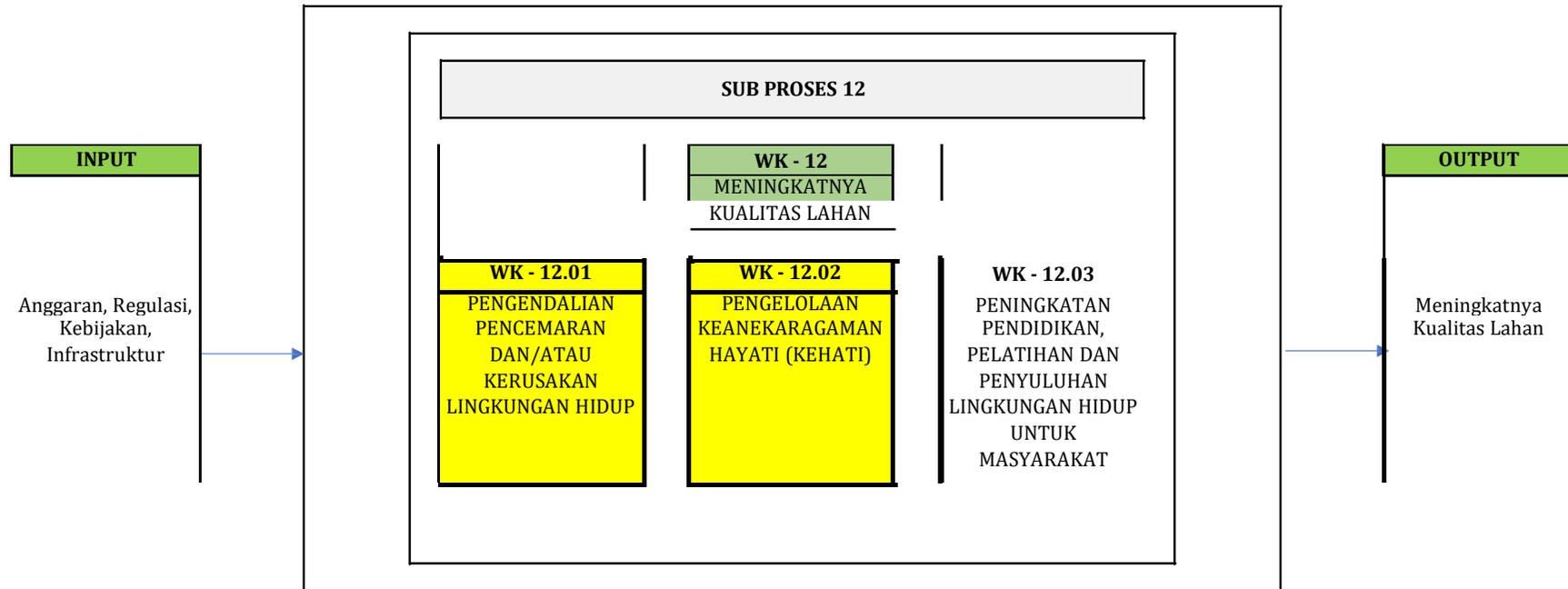
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



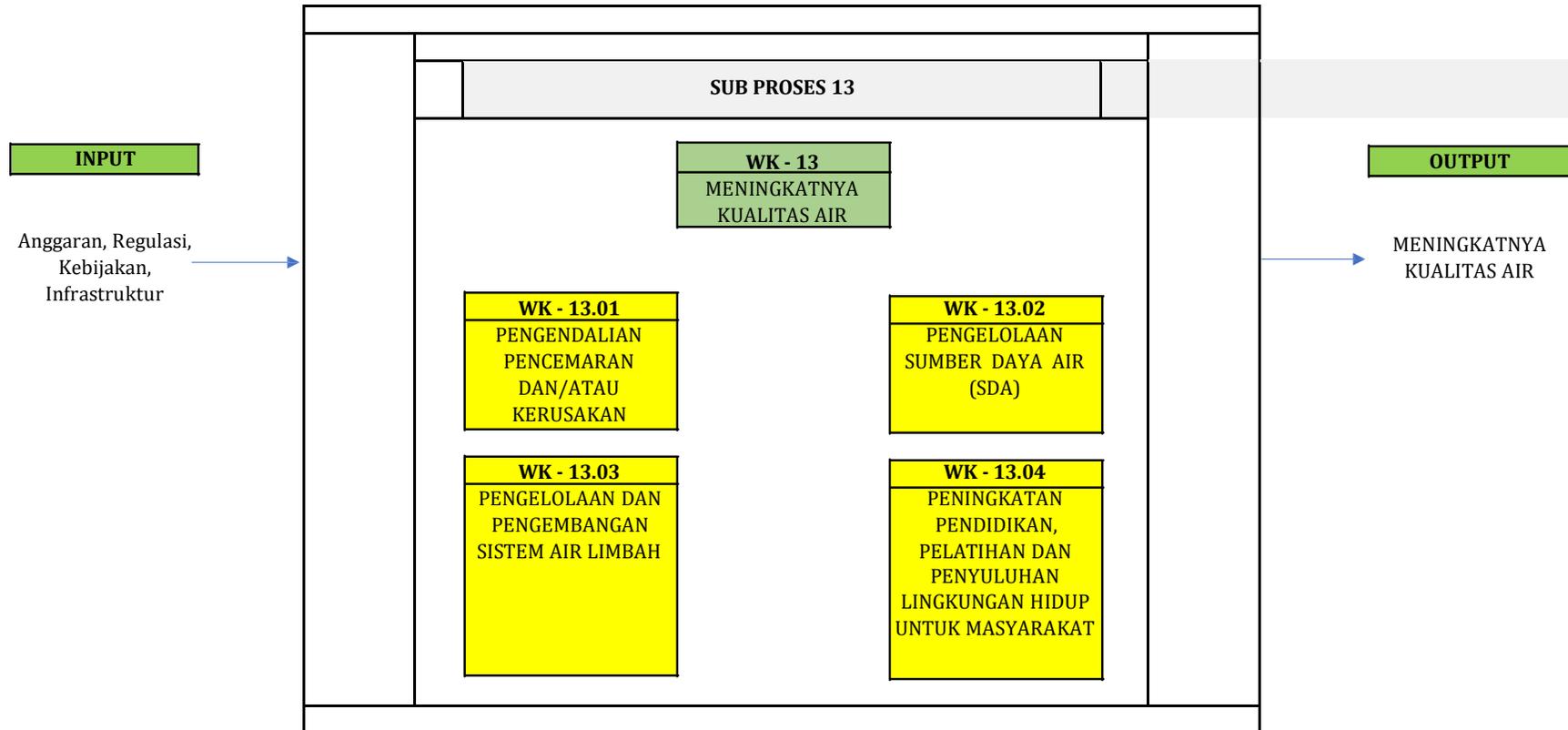
PETA SUB PROSES TUJUAN 1



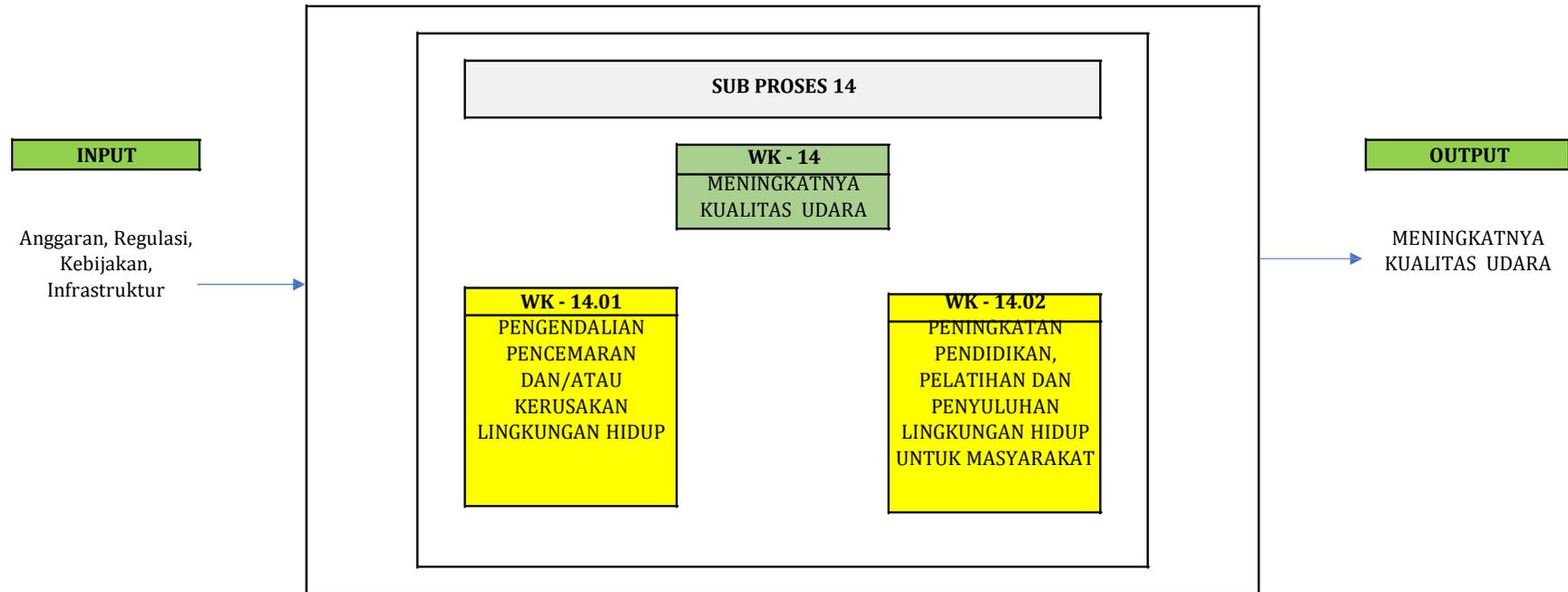
PETA SUB PROSES TUJUAN 2



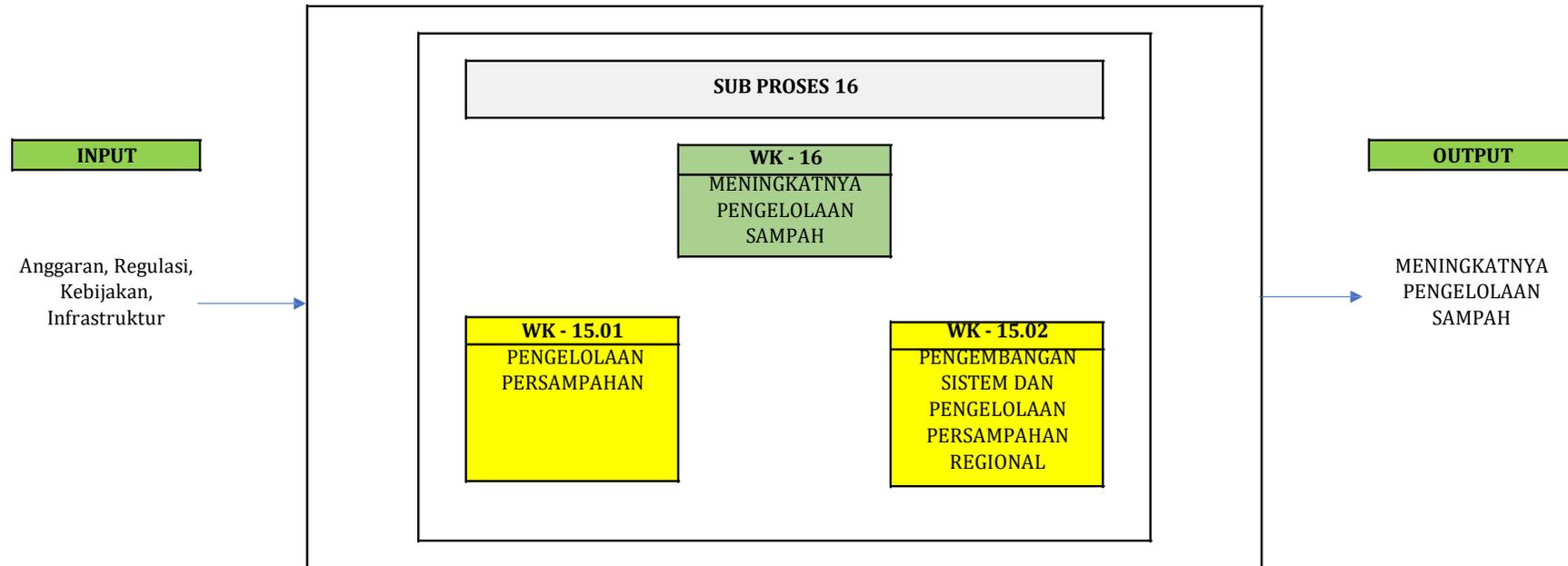
PETA SUB PROSES TUJUAN 2



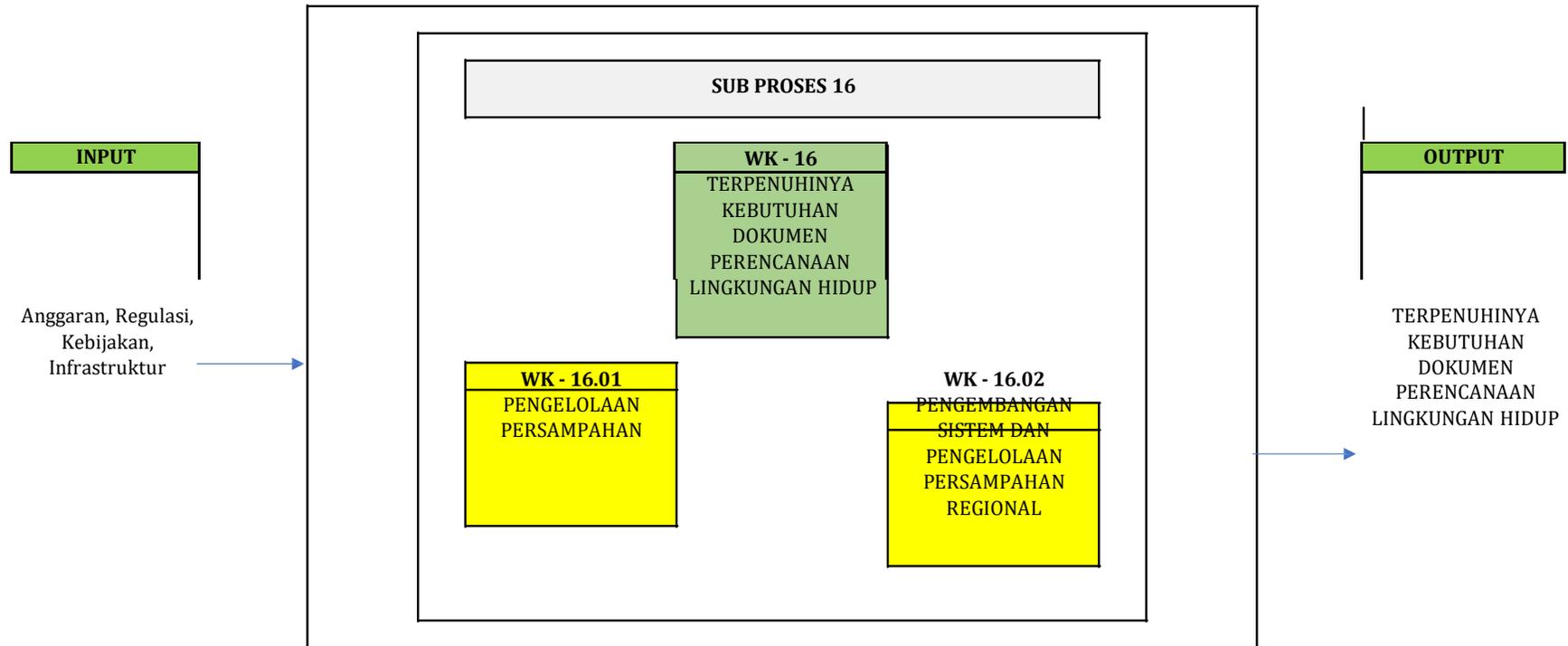
PETA SUB PROSES TUJUAN 2



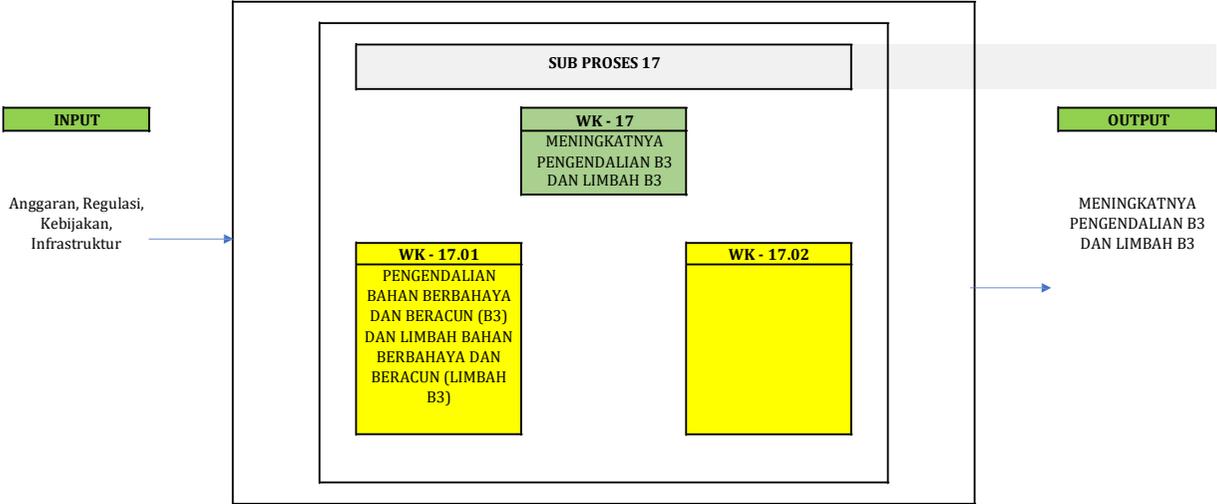
PETA SUB PROSES TUJUAN 2

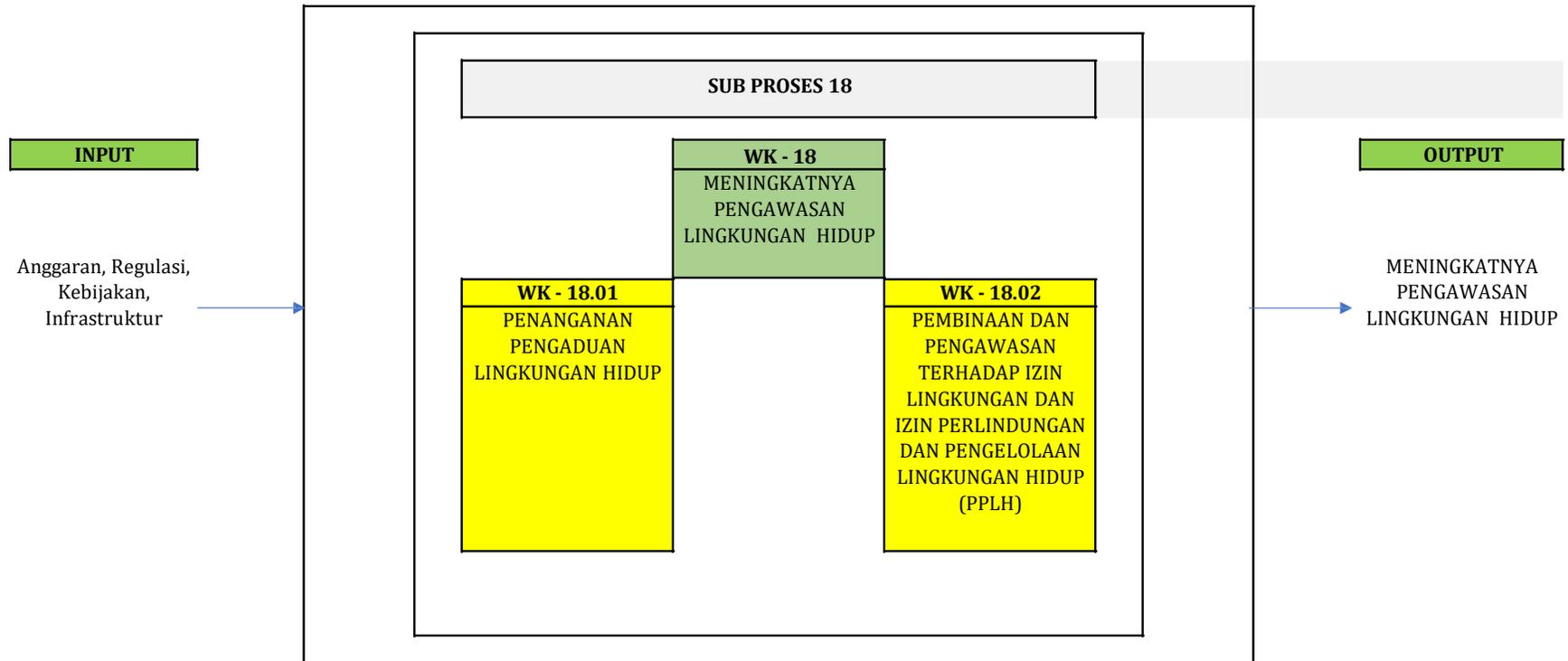


PETA SUB PROSES TUJUAN 2

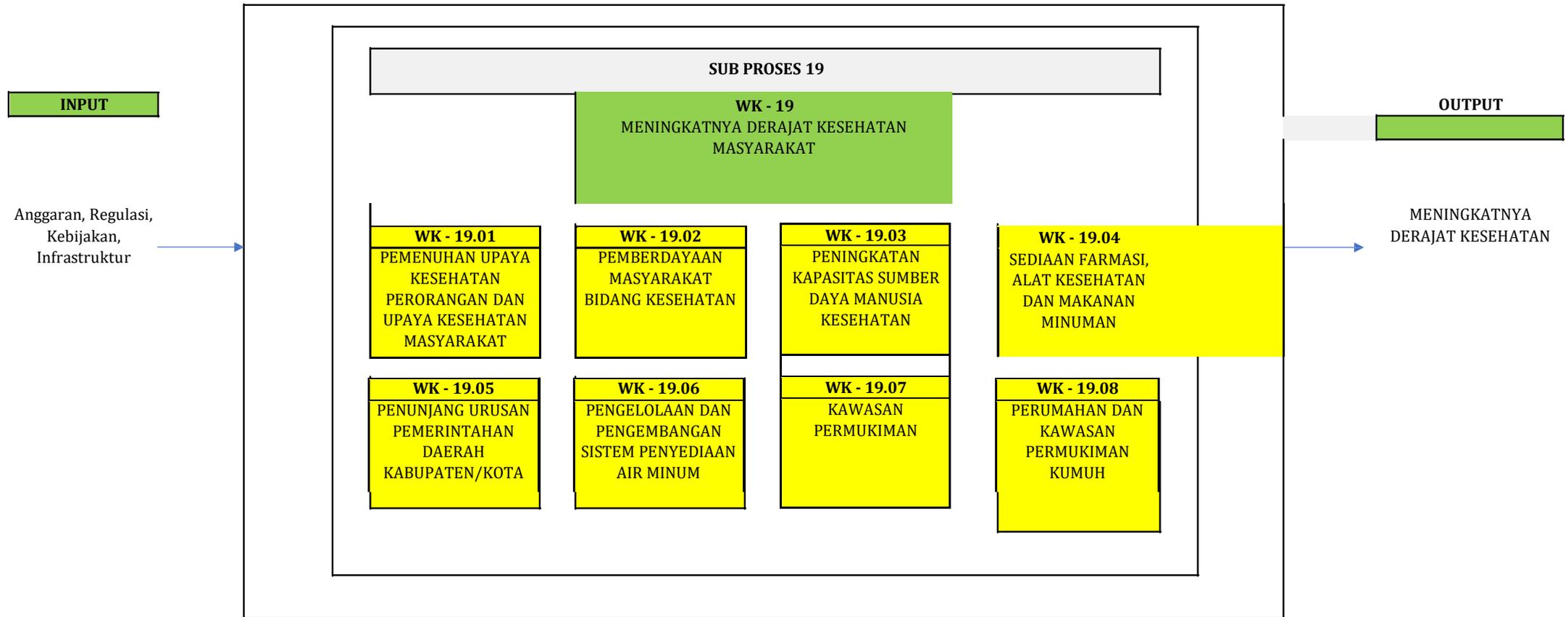


PETA SUB PROSES TUJUAN 2

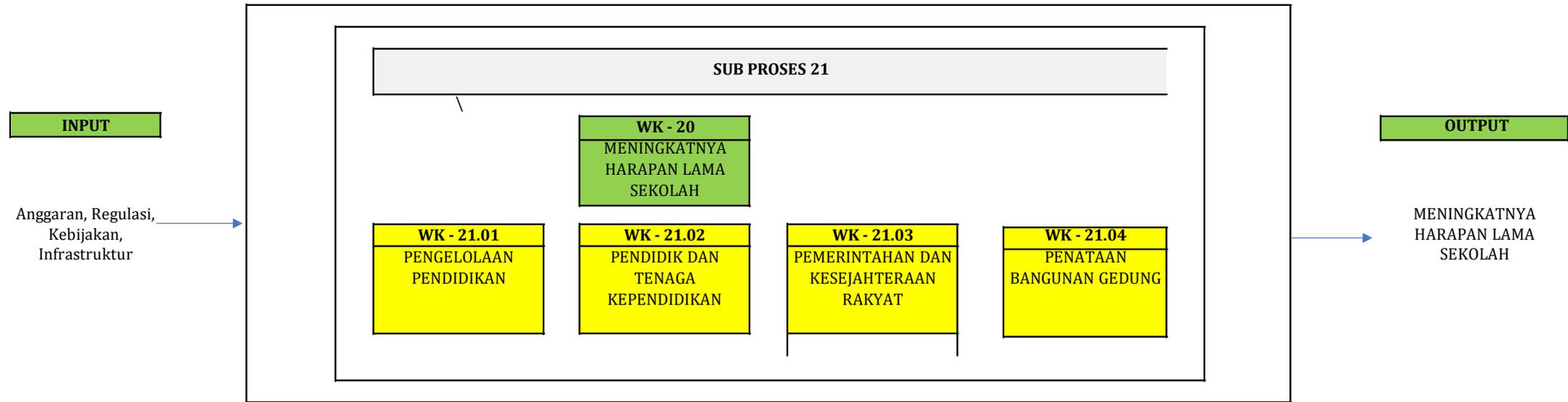


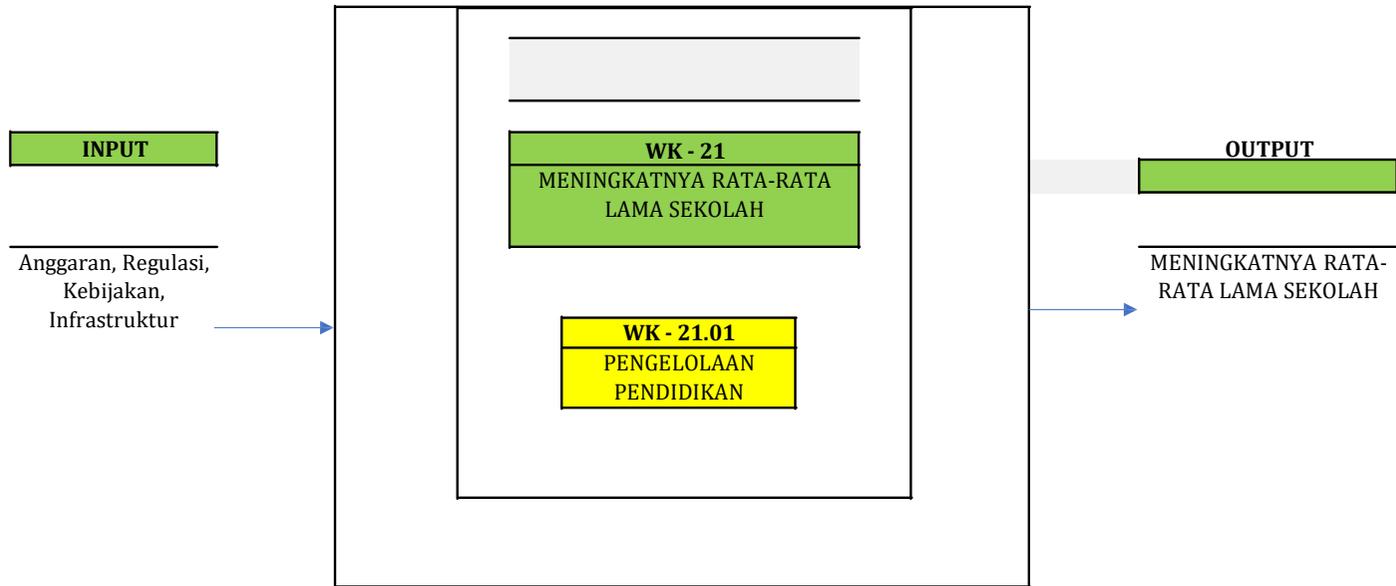


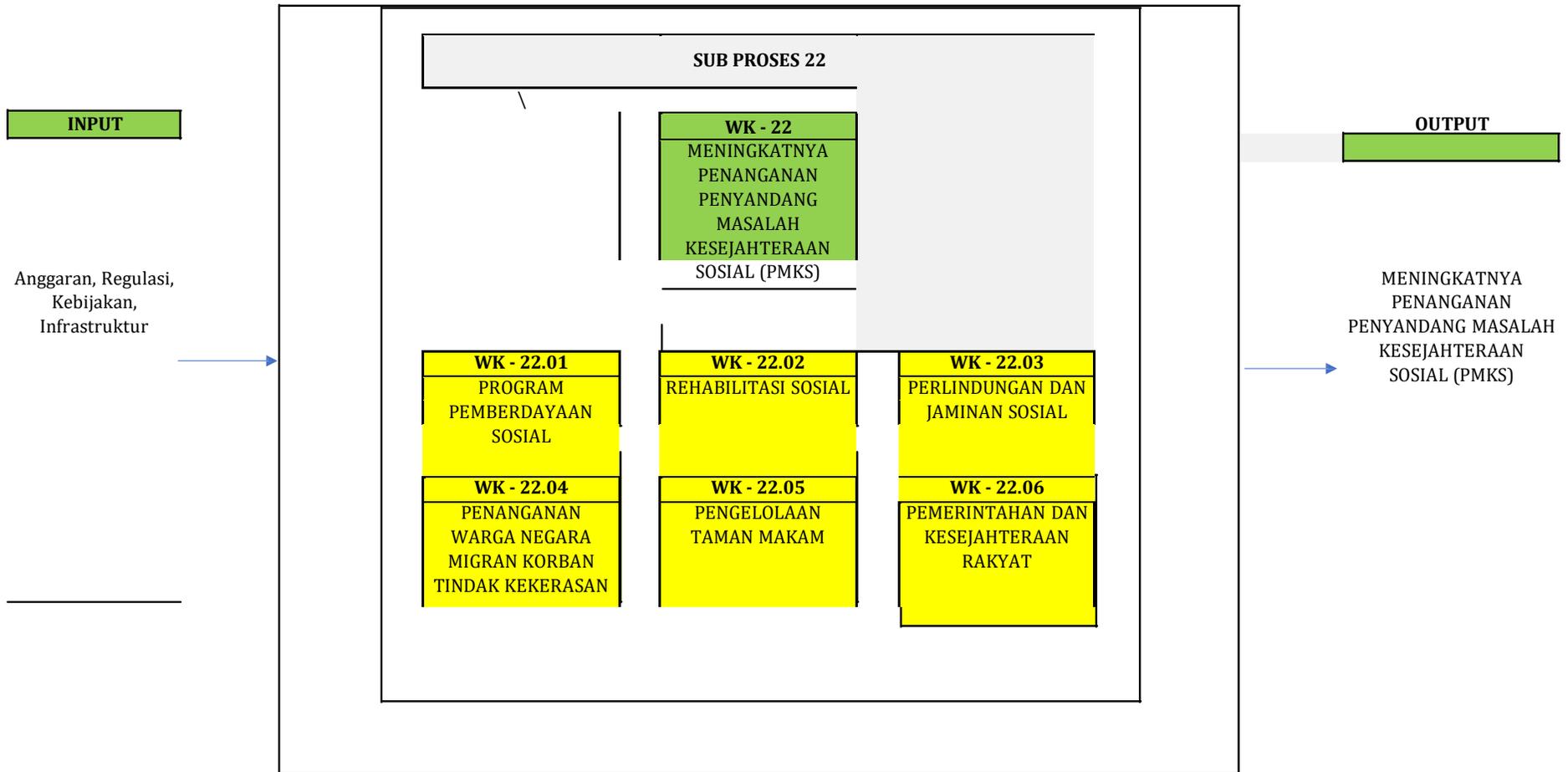
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



PETA SUB PROSES TUJUAN 3





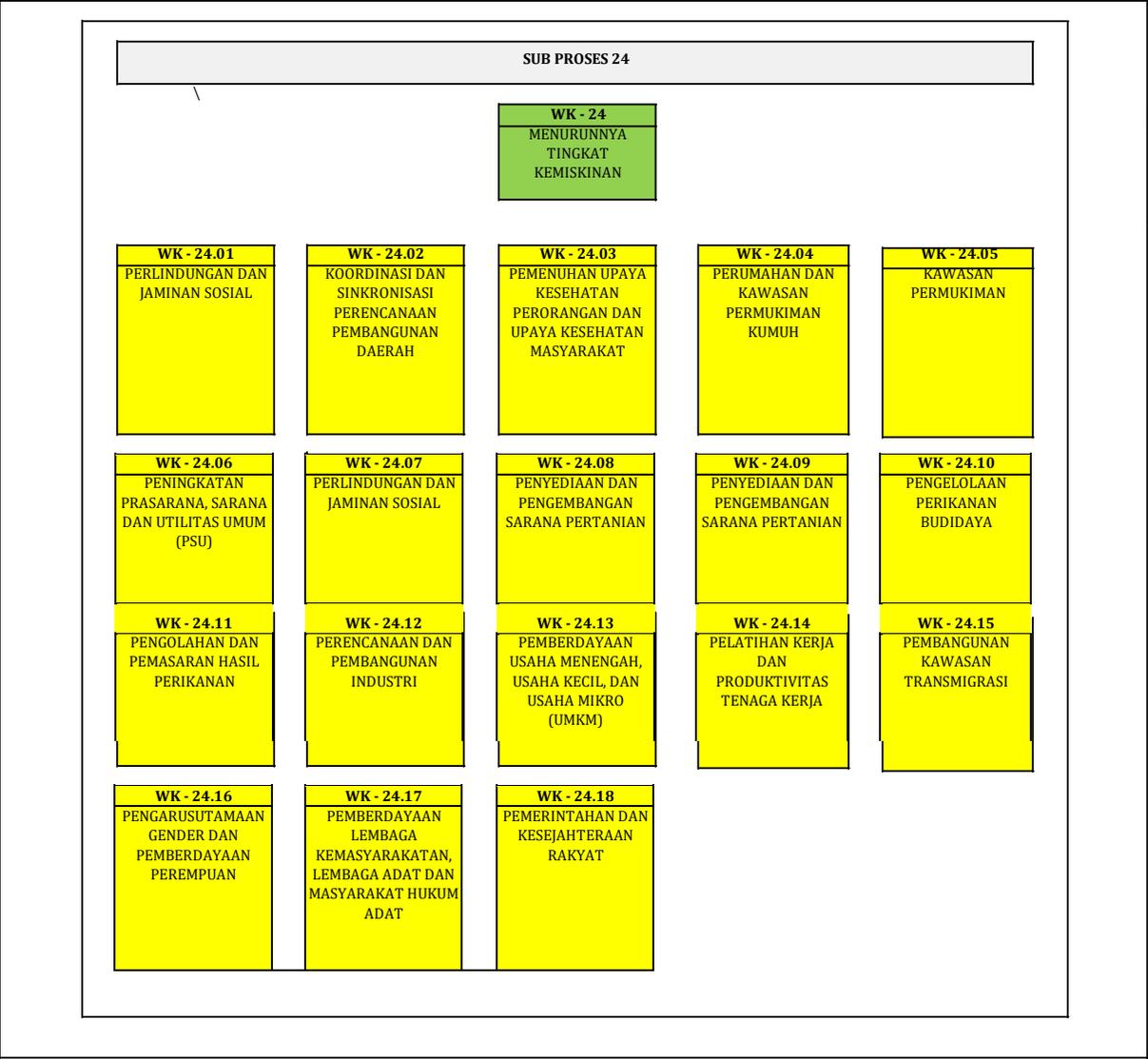




PETA SUB PROSES TUJUAN 3

INPUT

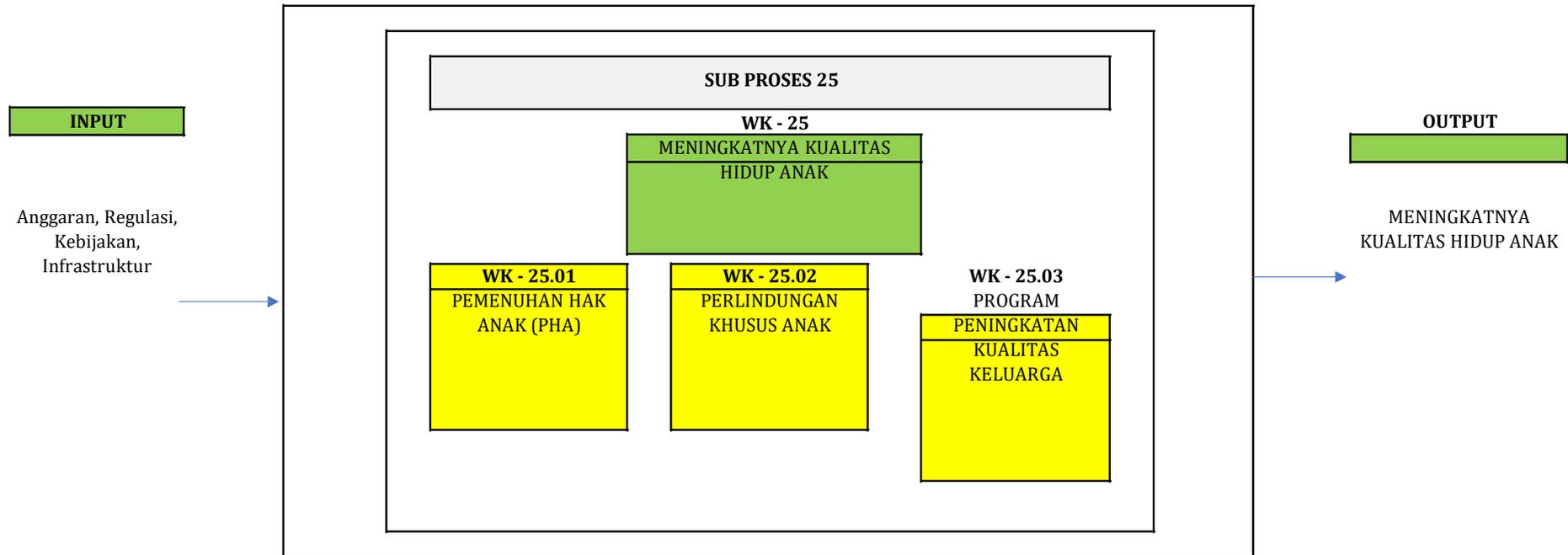
Anggaran, Regulasi,
Kebijakan,
Infrastruktur



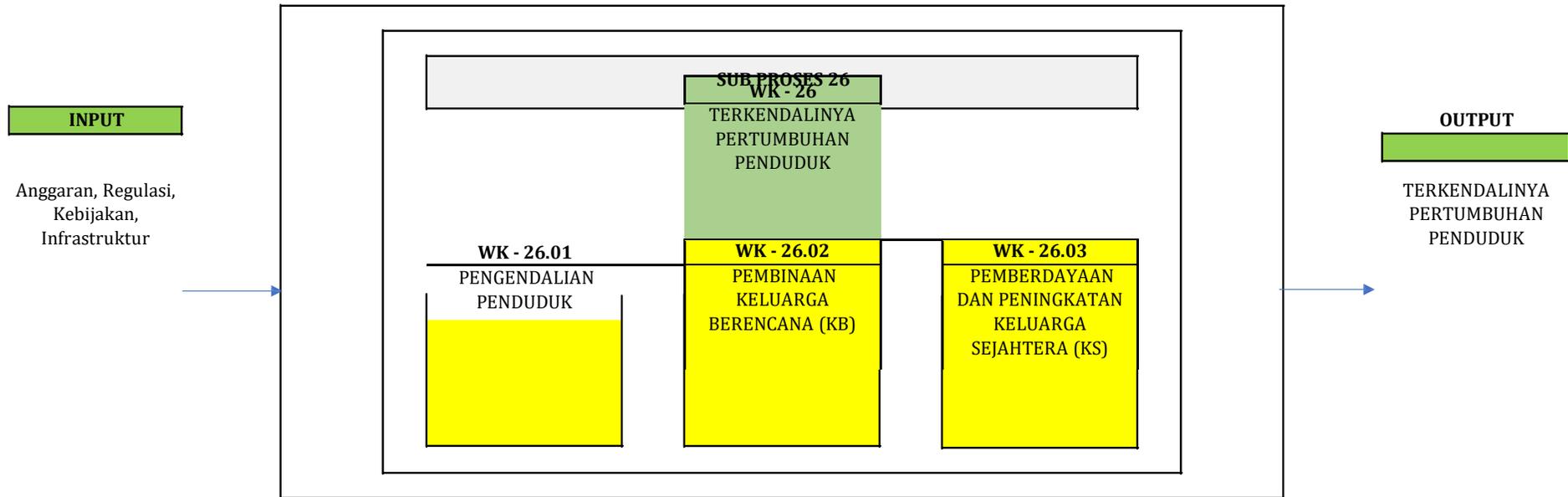
OUTPUT

MENURUNNYA TINGKAT
KEMISKINAN

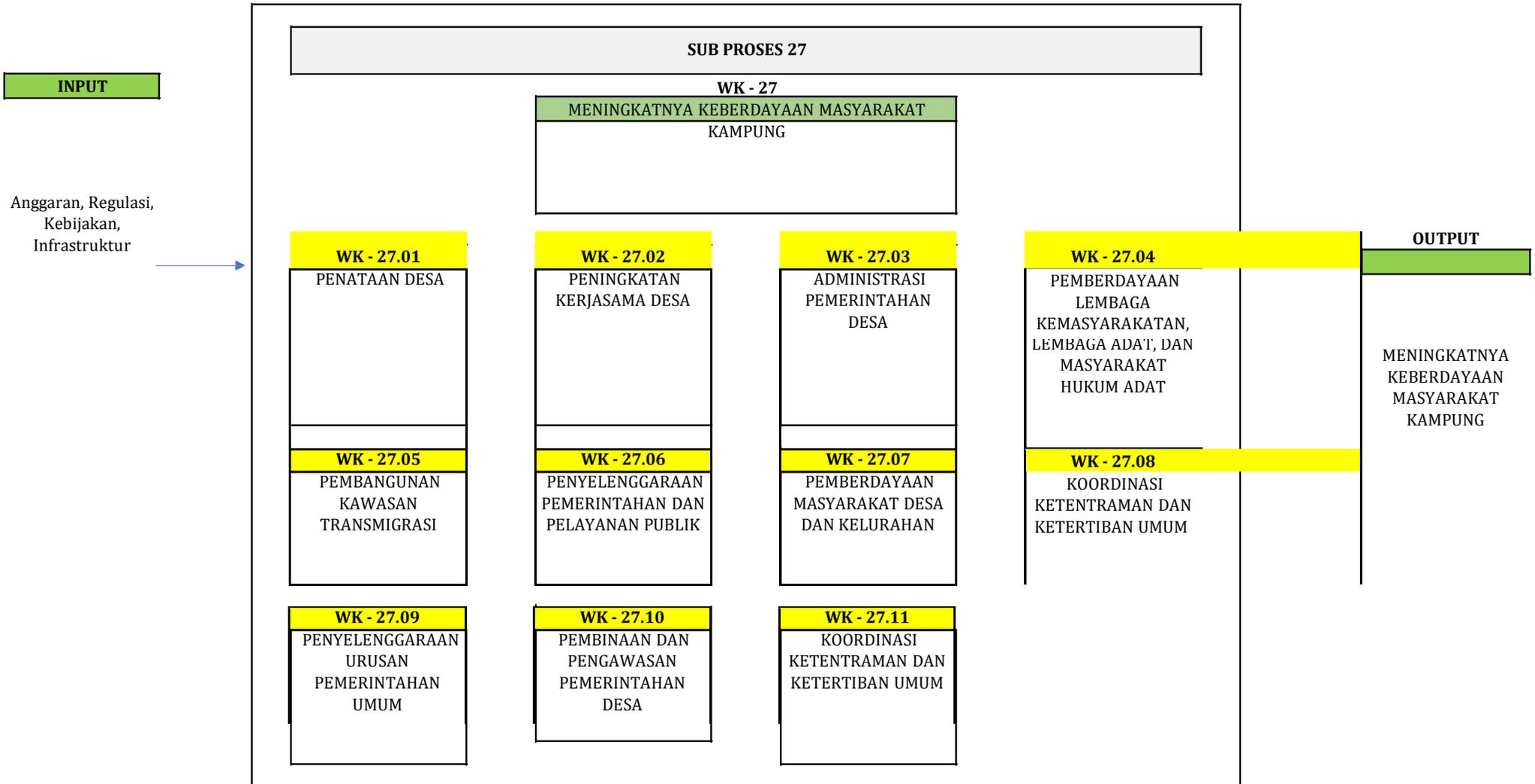
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



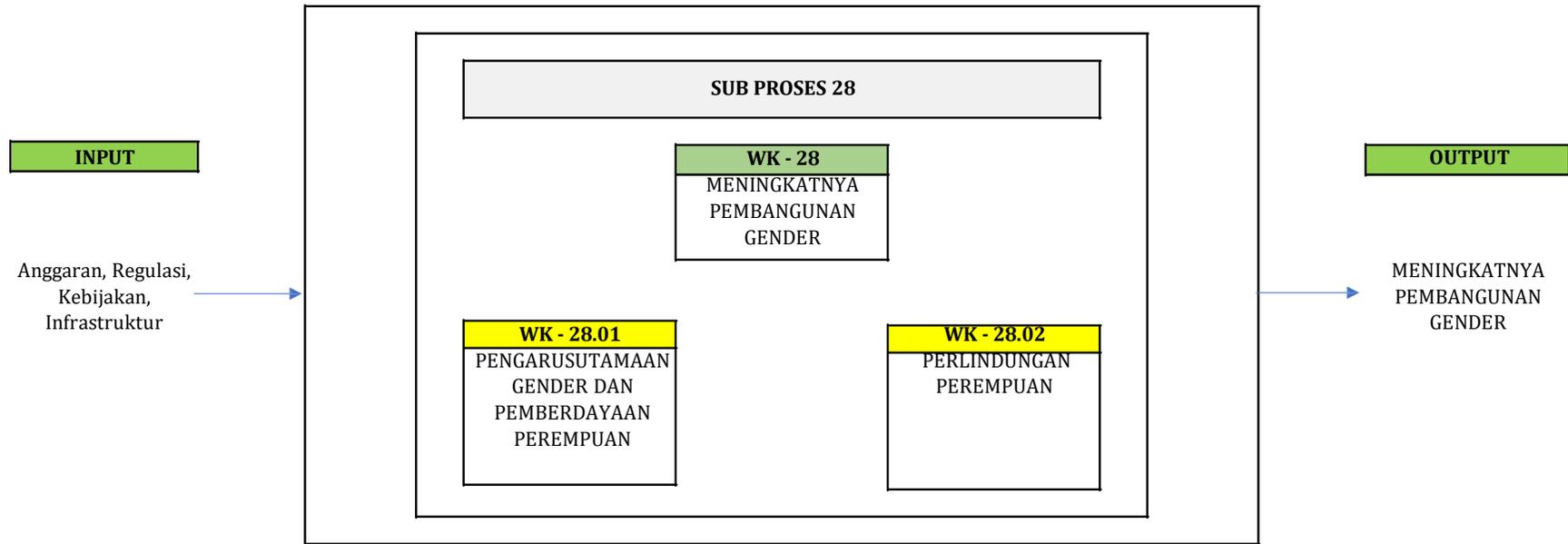
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



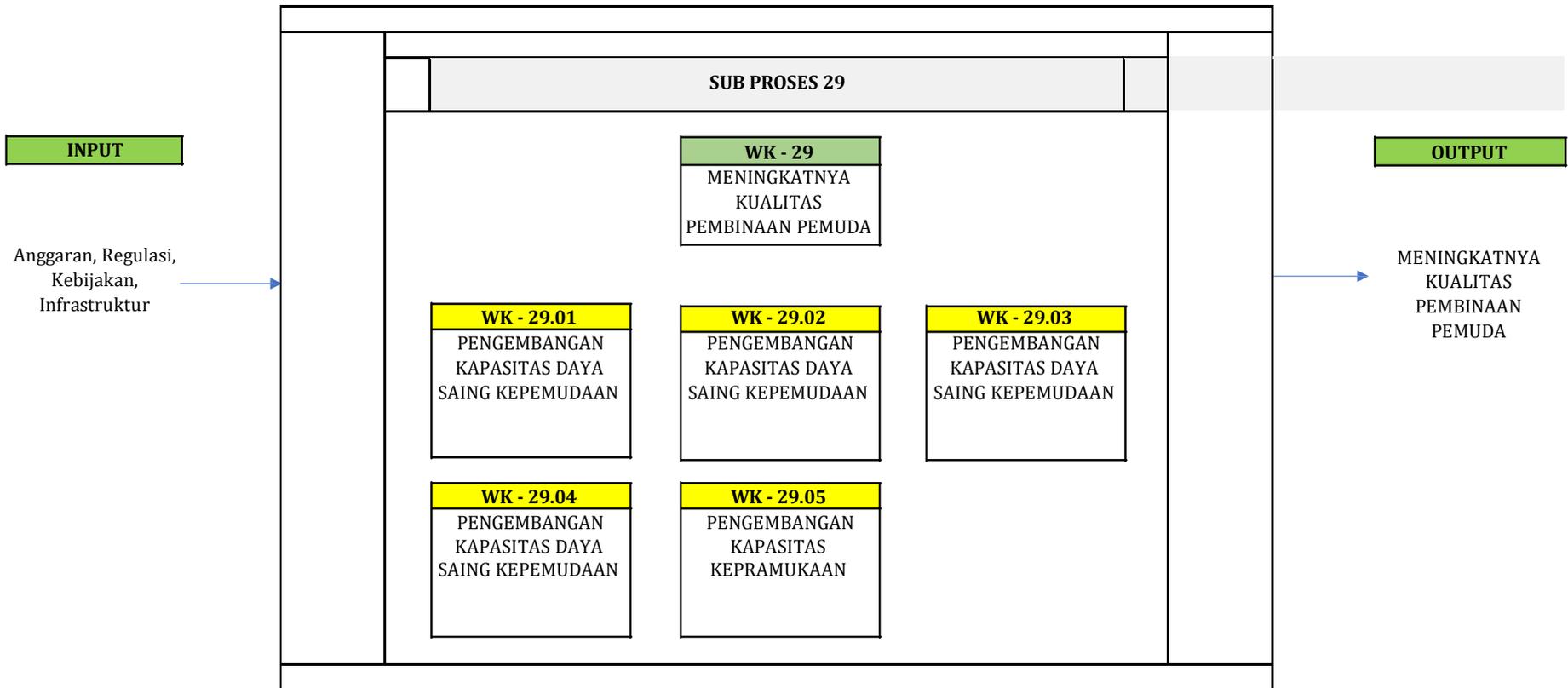
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



PETA SUB PROSES TUJUAN 3



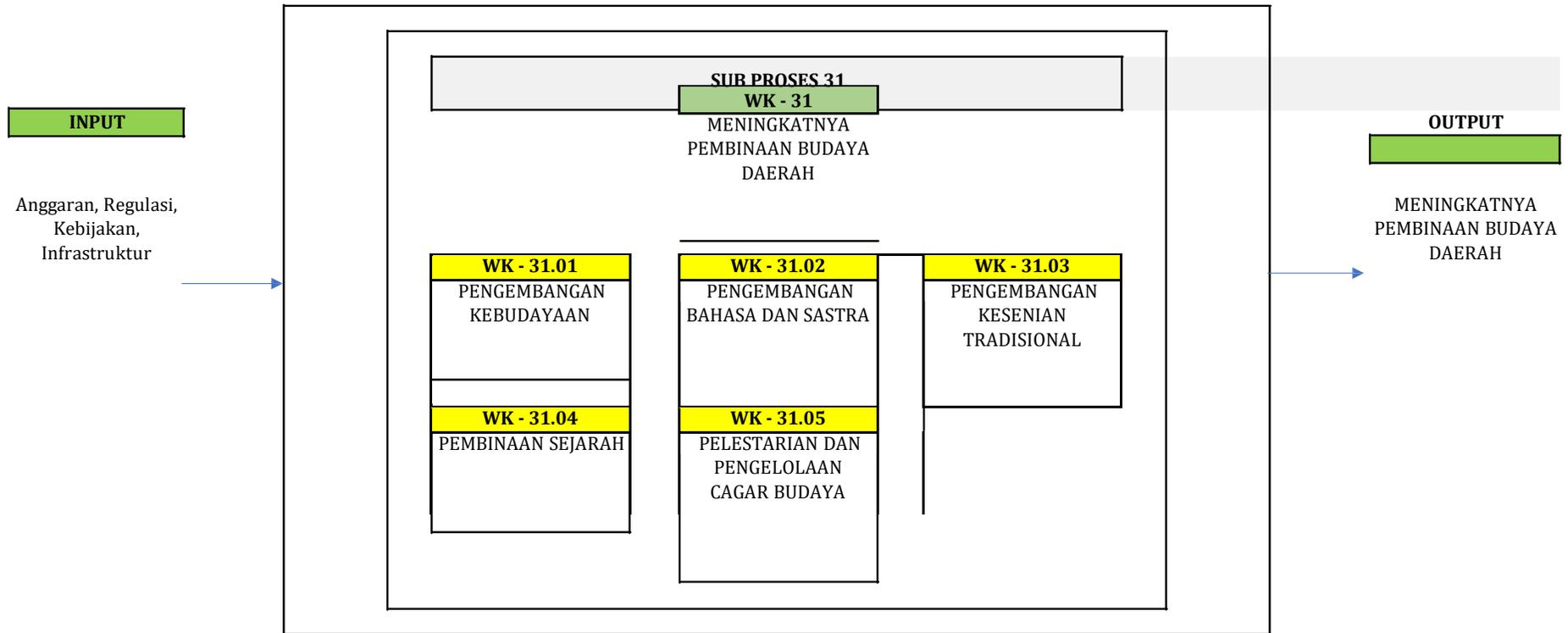
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



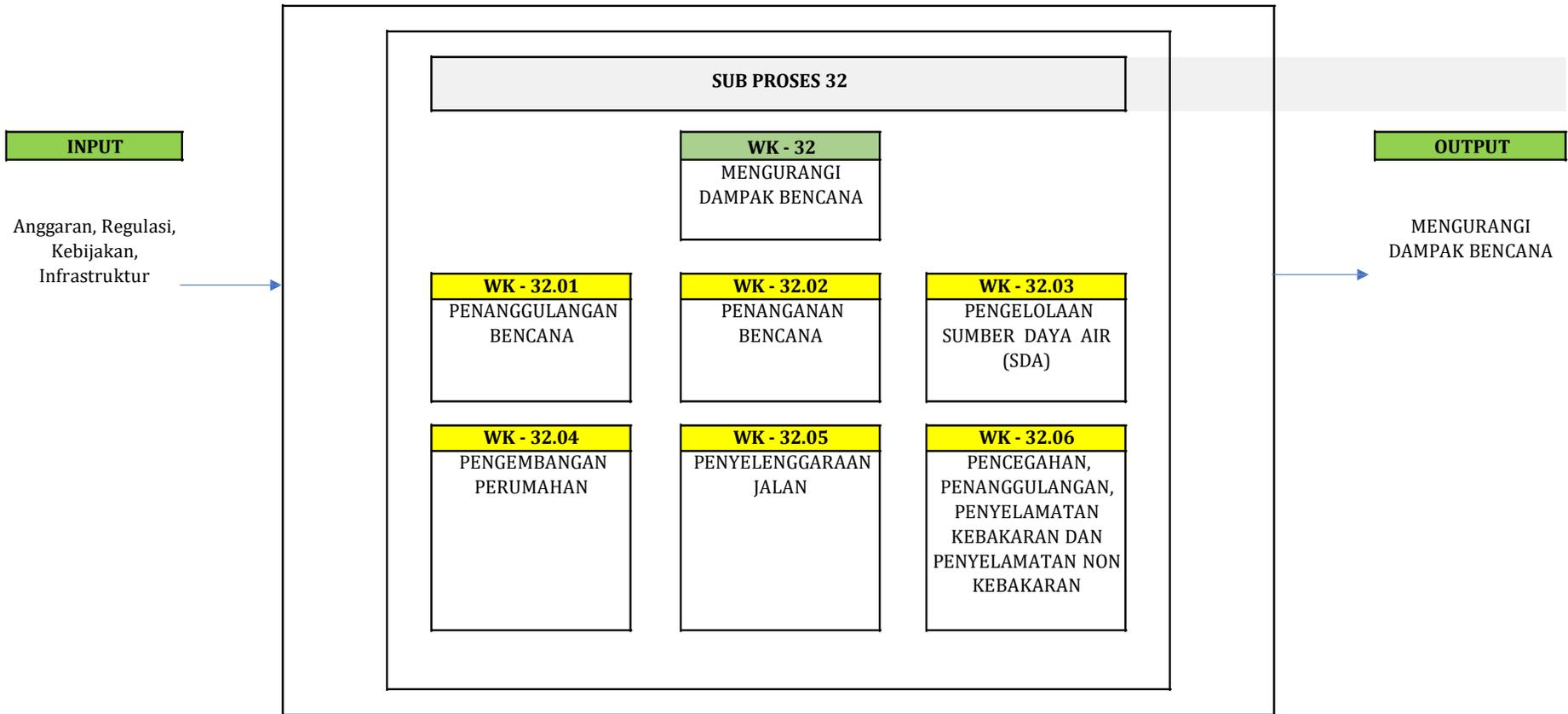
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



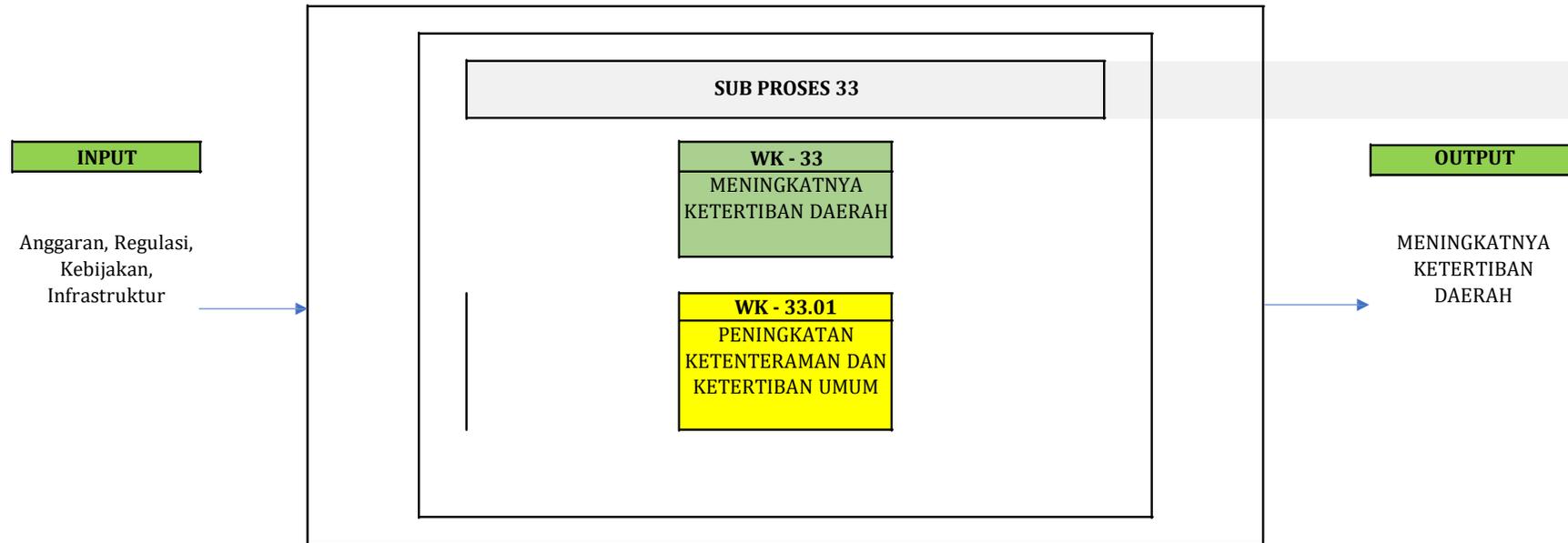
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



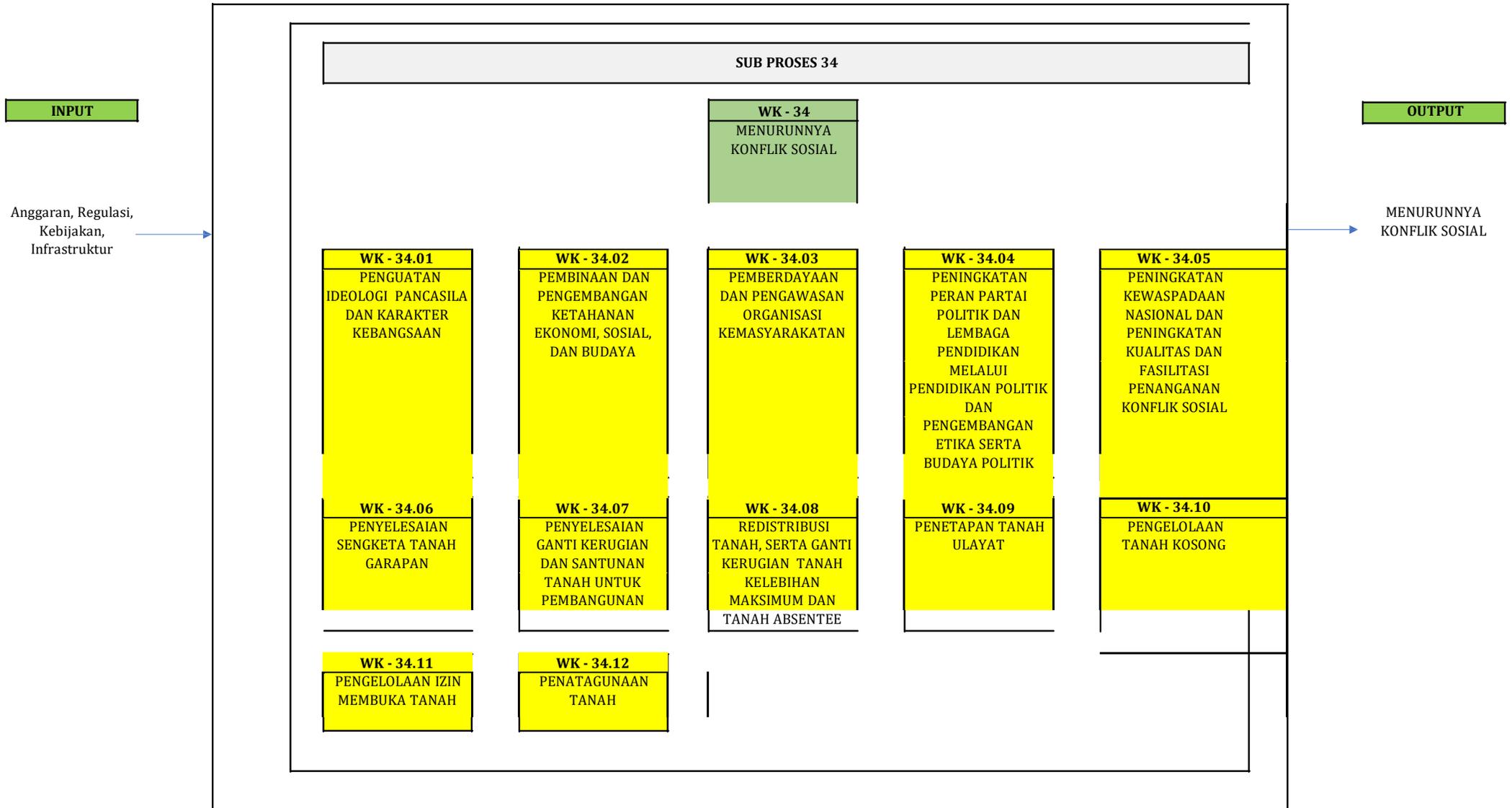
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



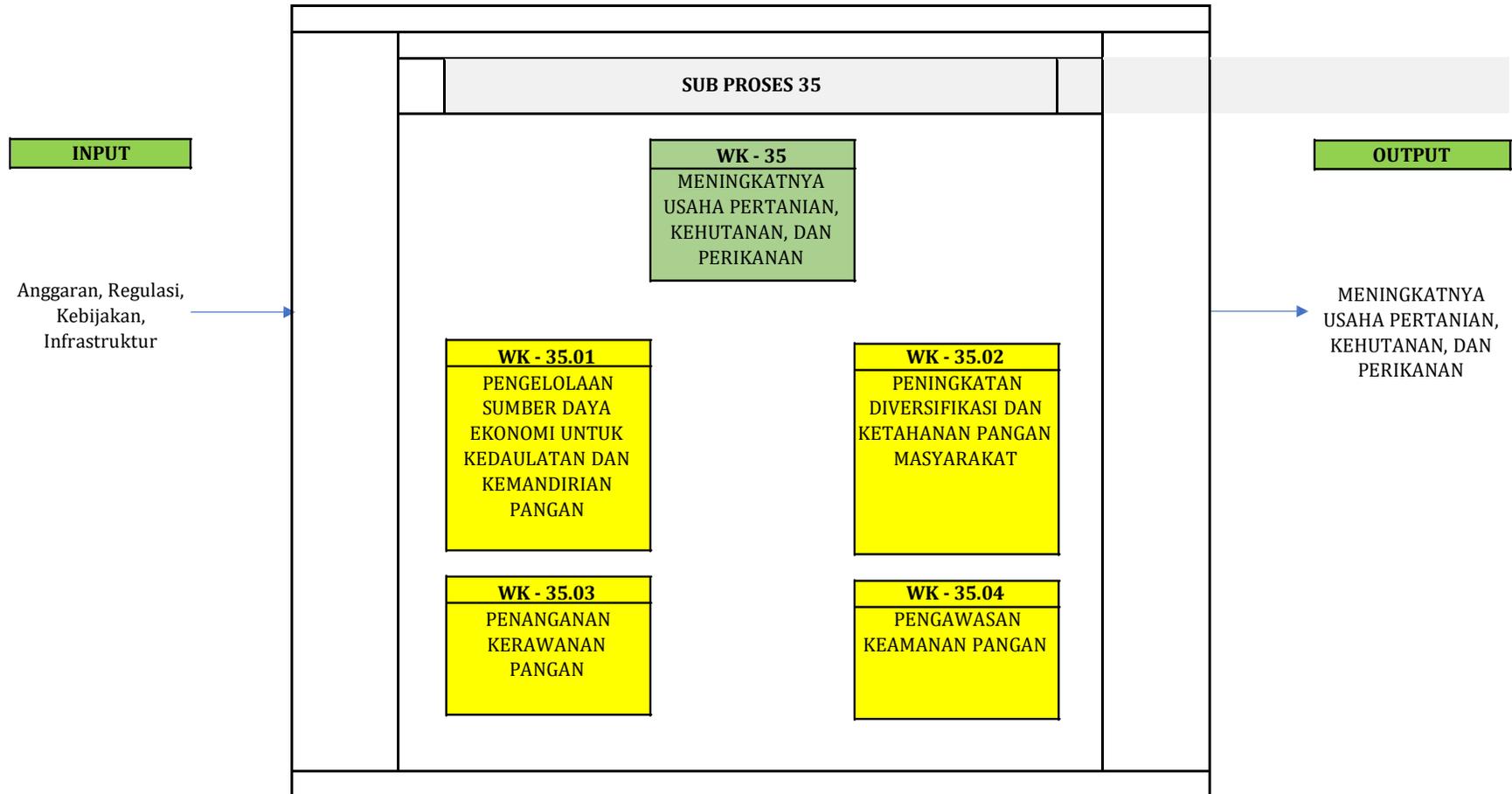
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



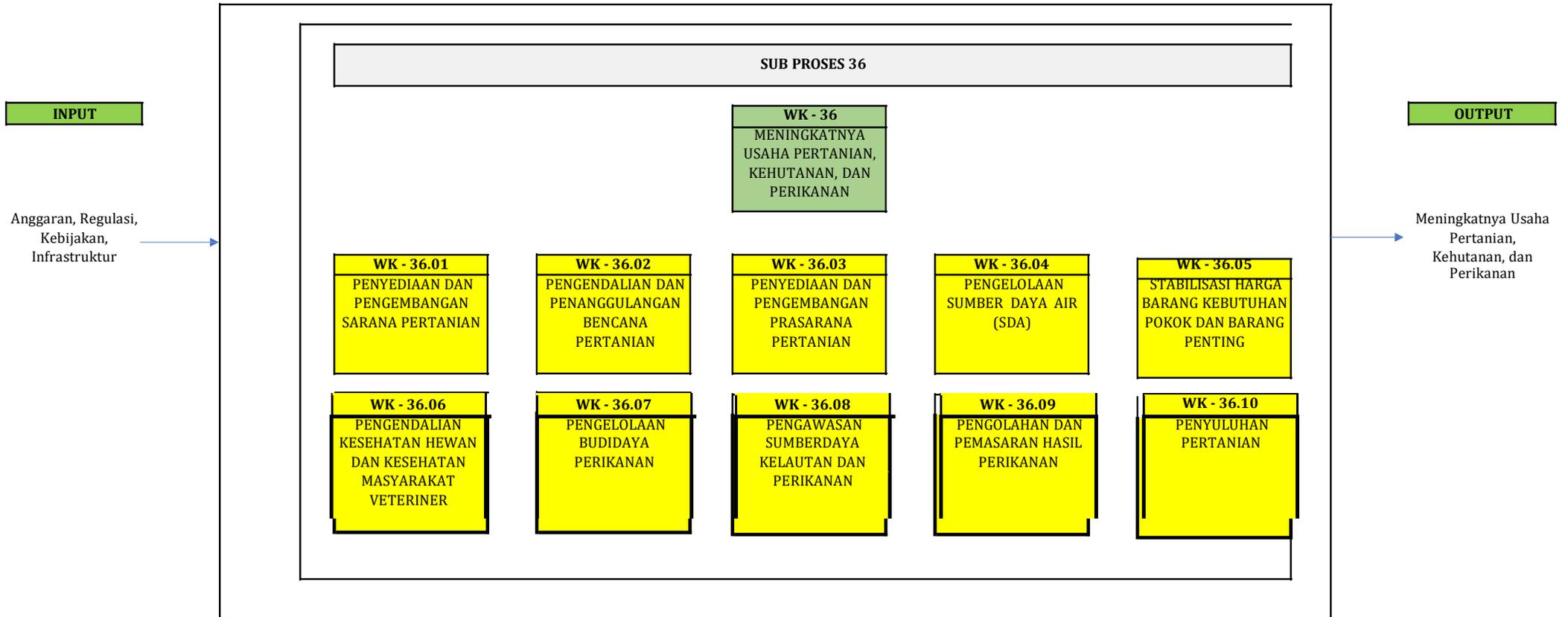
PETA SUB PROSES TUJUAN 3

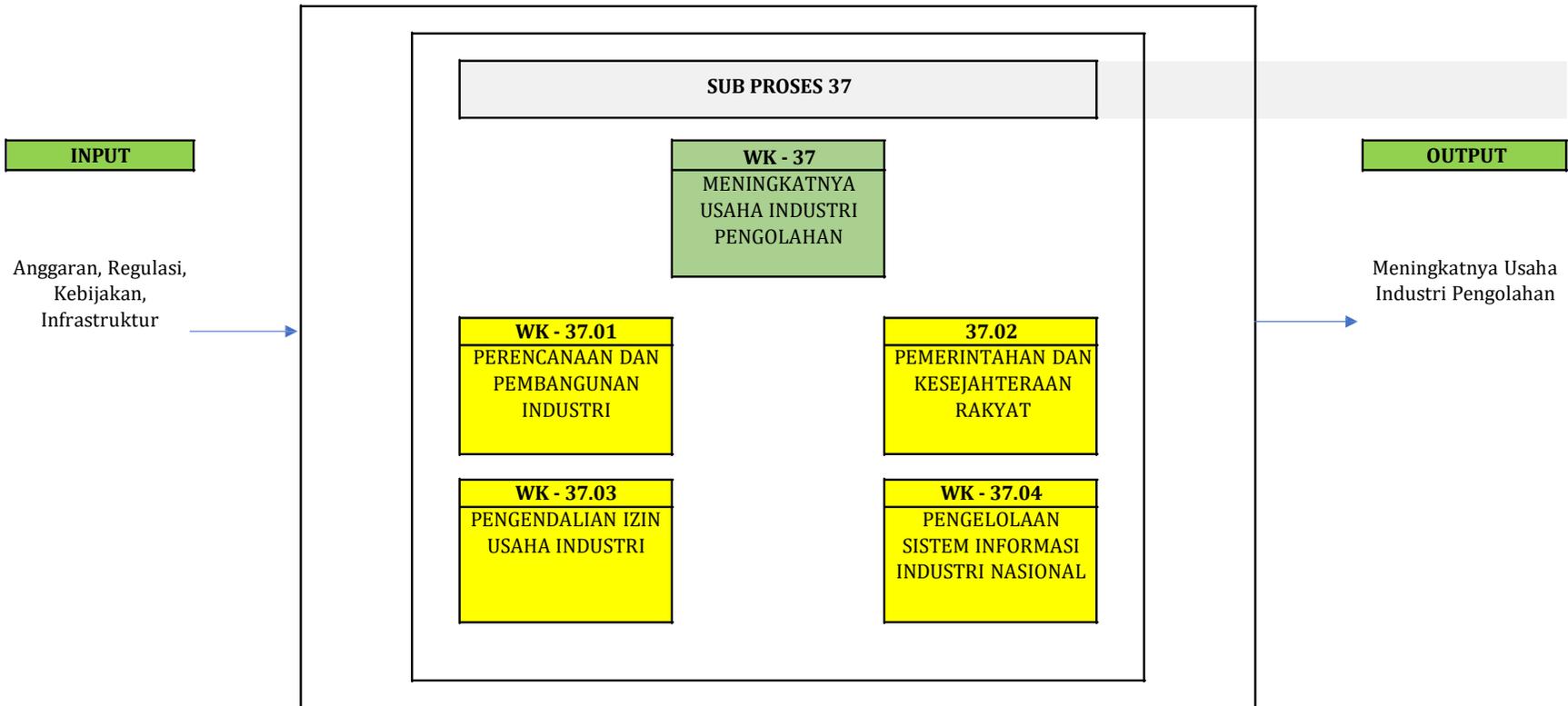


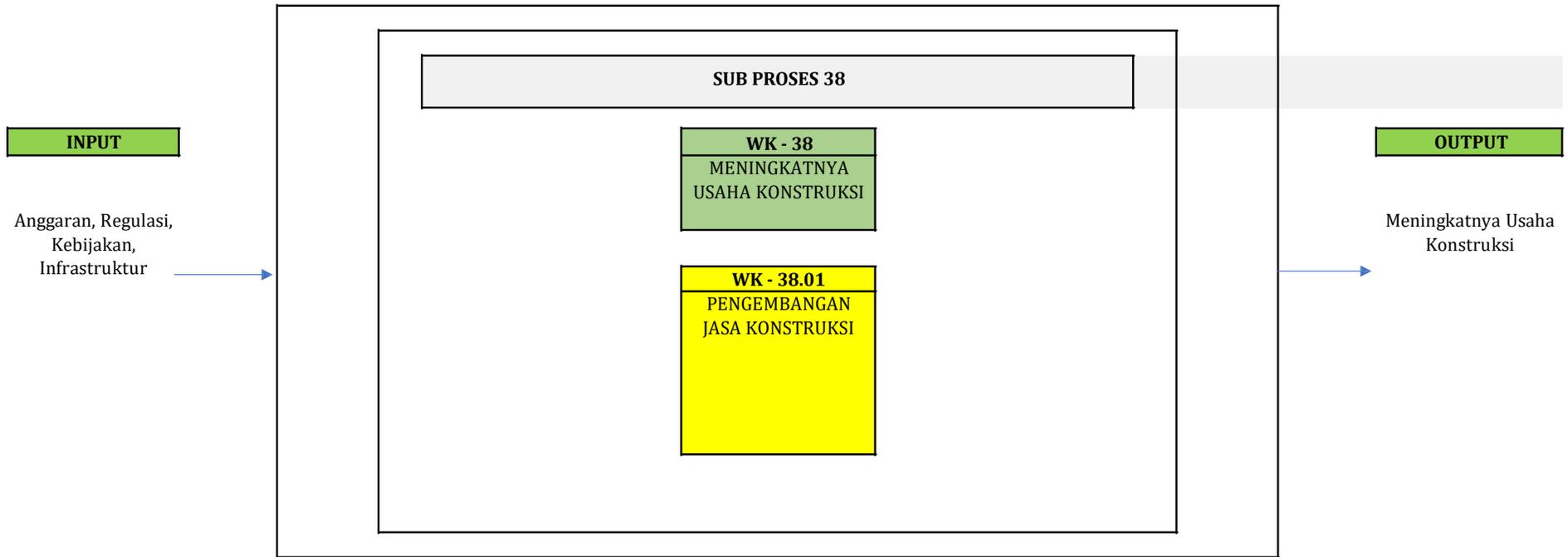
PETA SUB PROSES TUJUAN 3



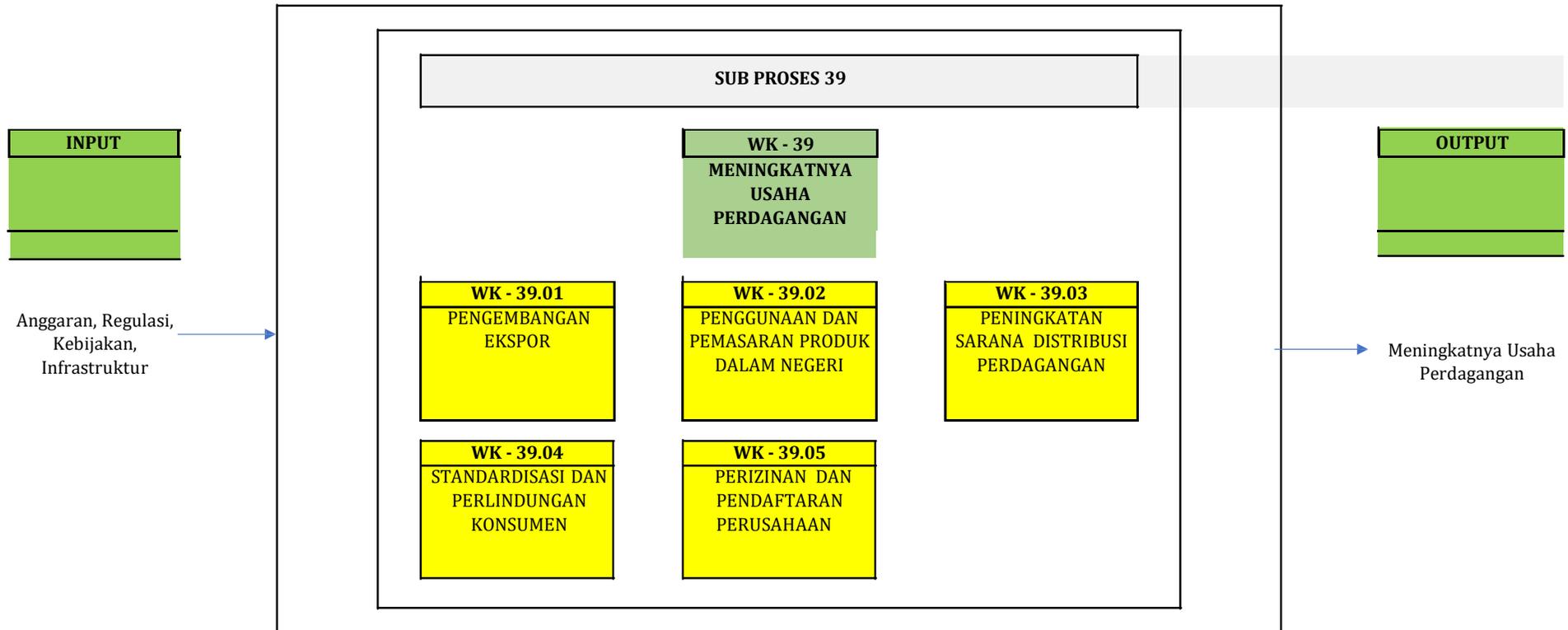
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



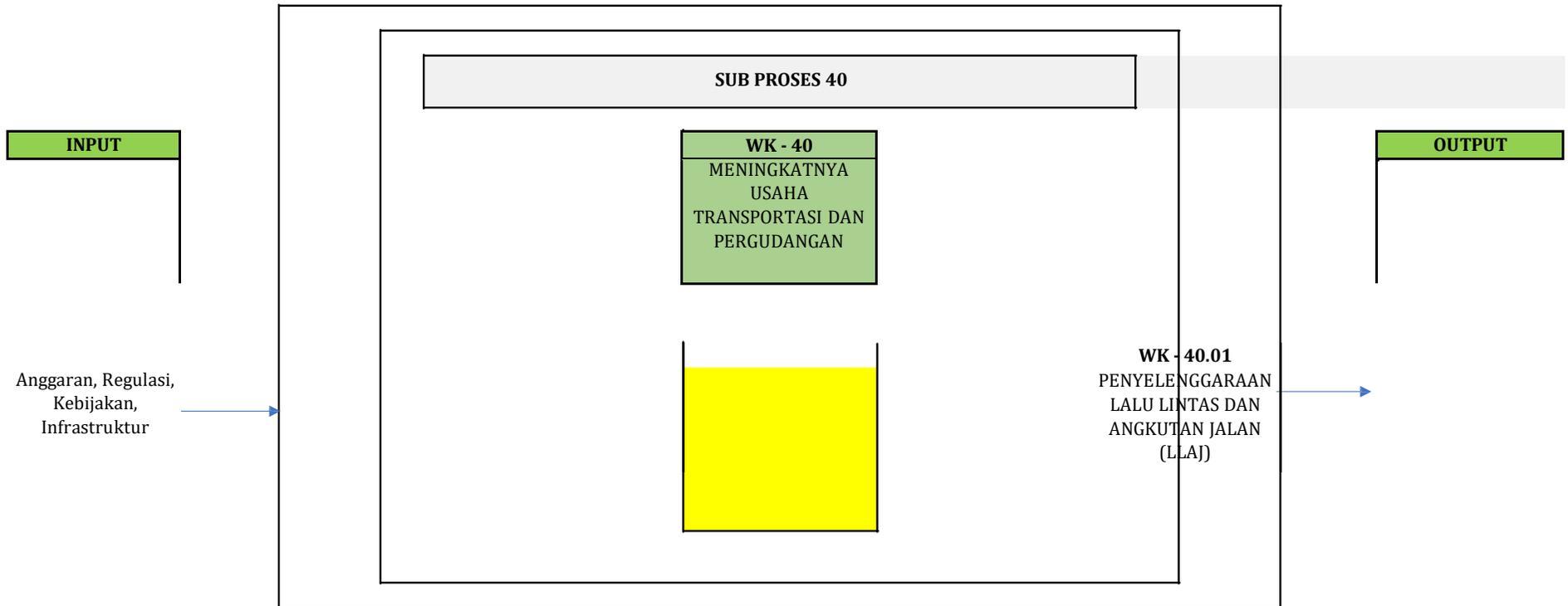




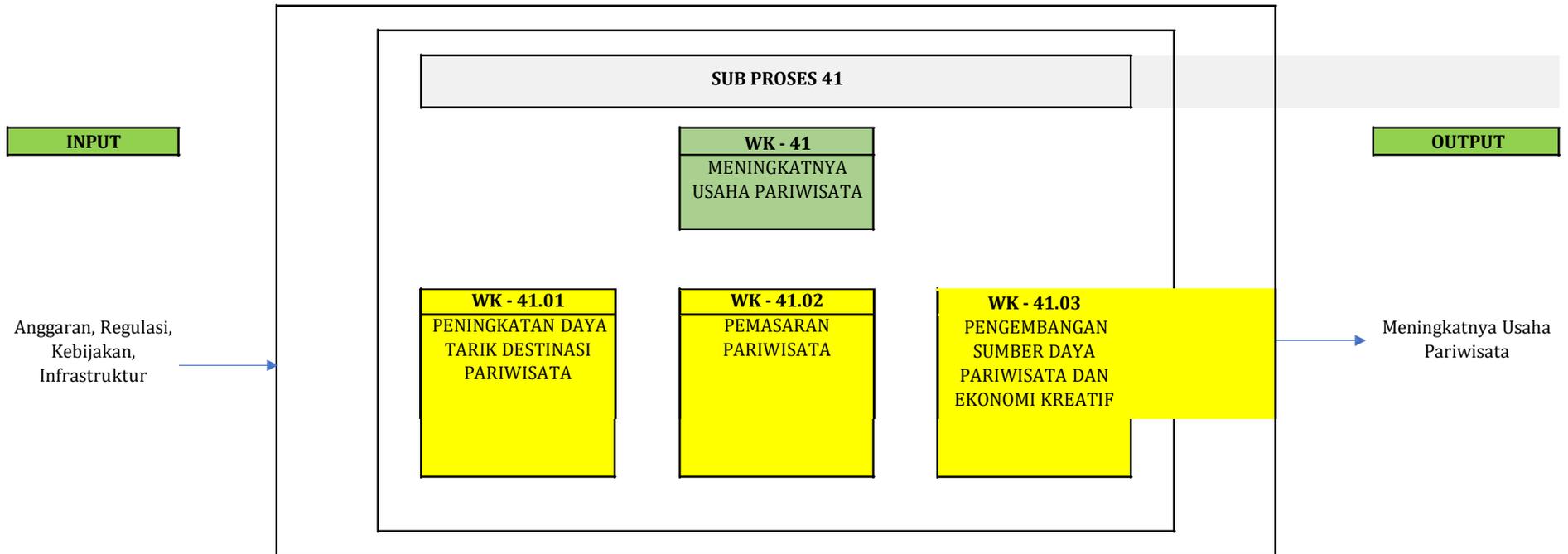
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



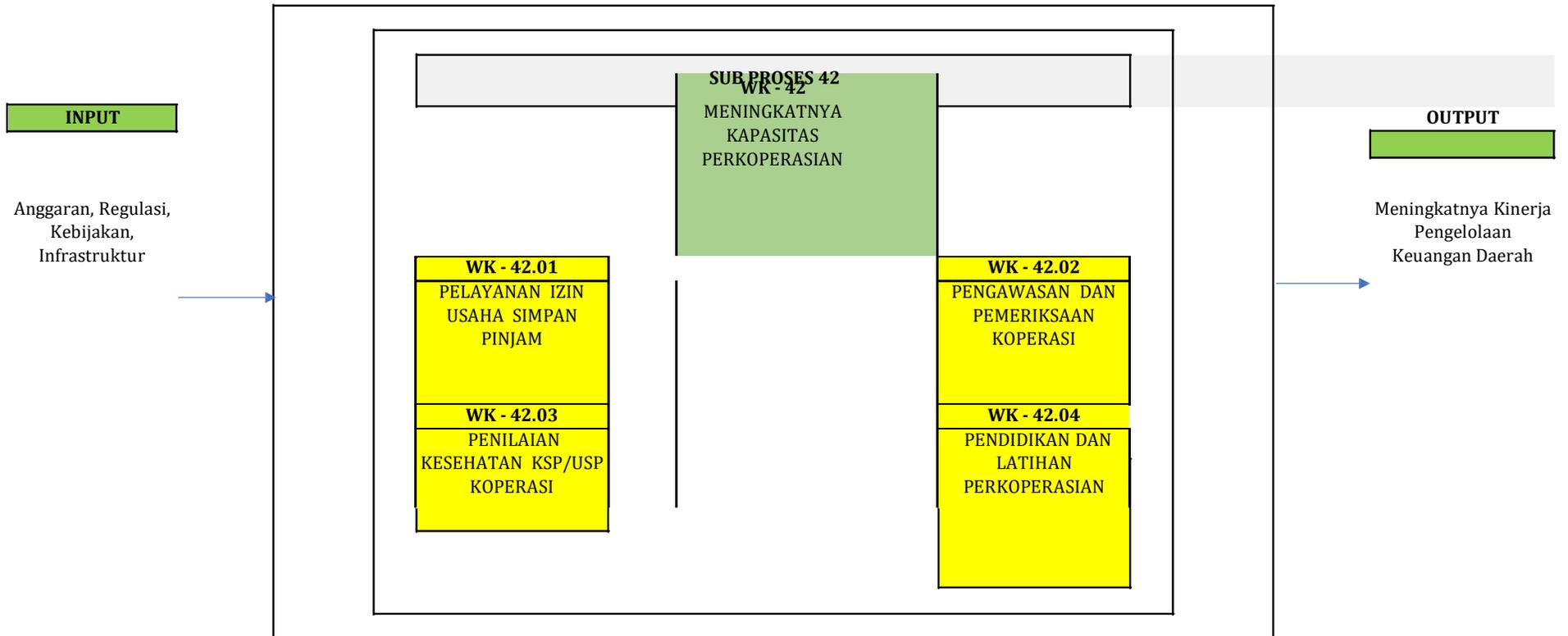
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



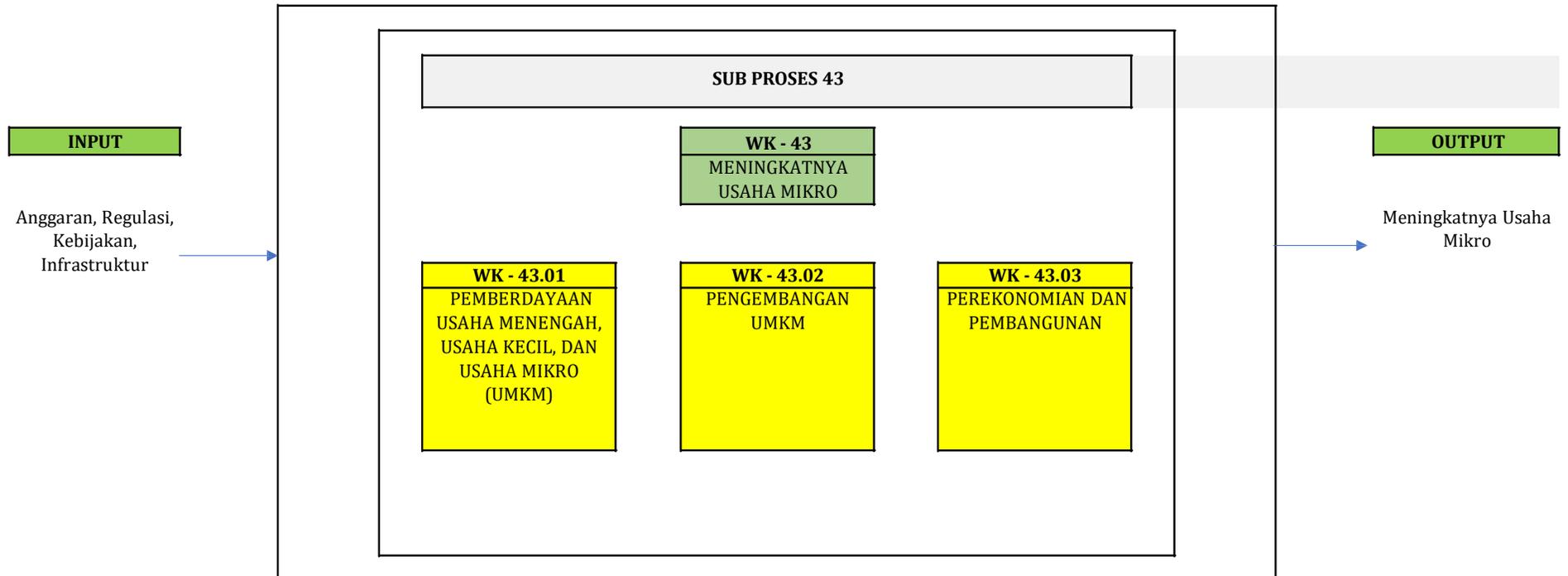
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



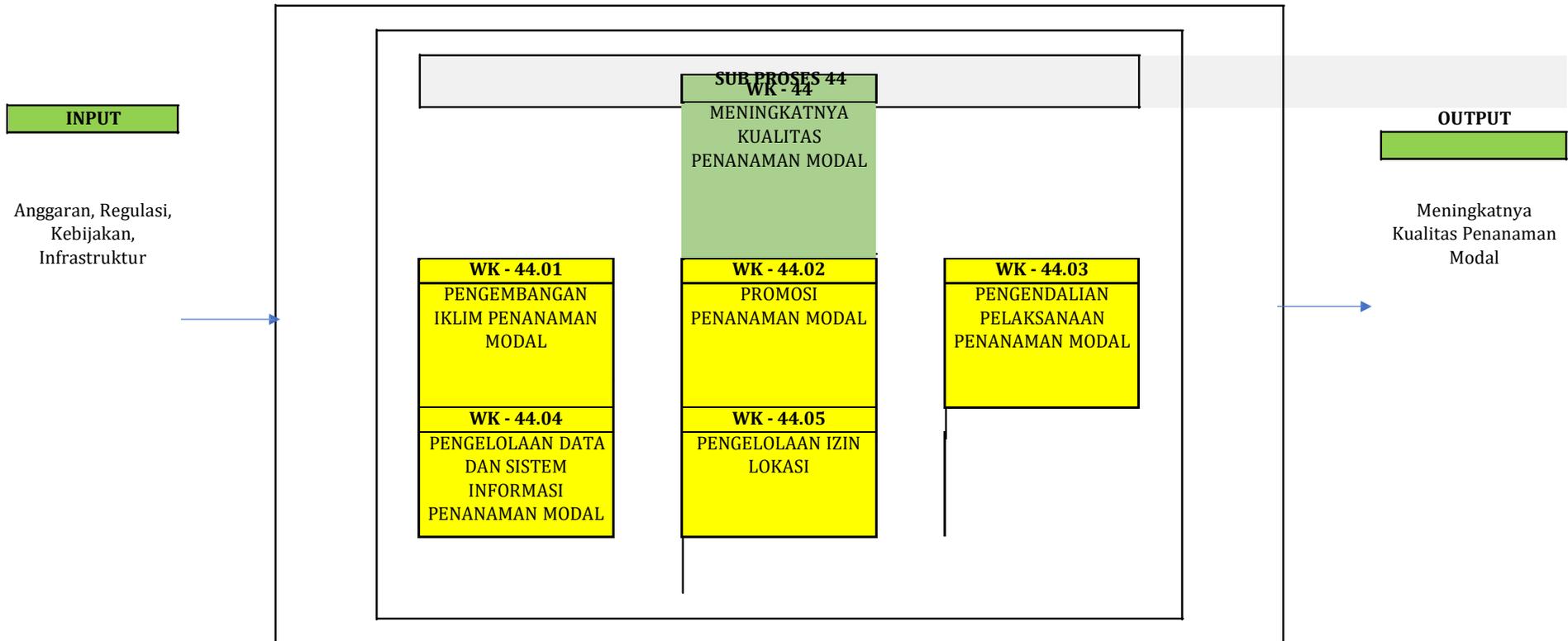
PETA SUB PROSES TUJUAN 4

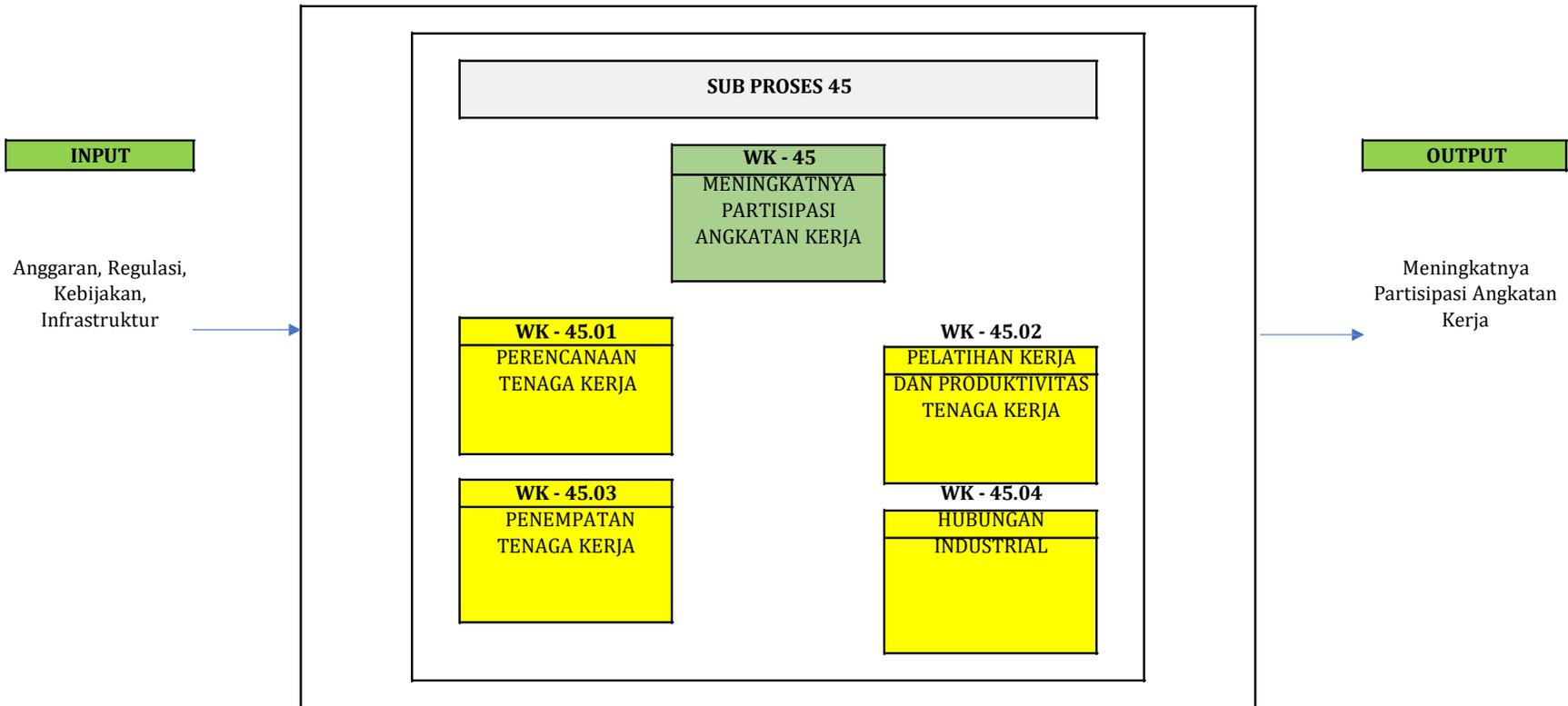


PETA SUB PROSES TUJUAN 4

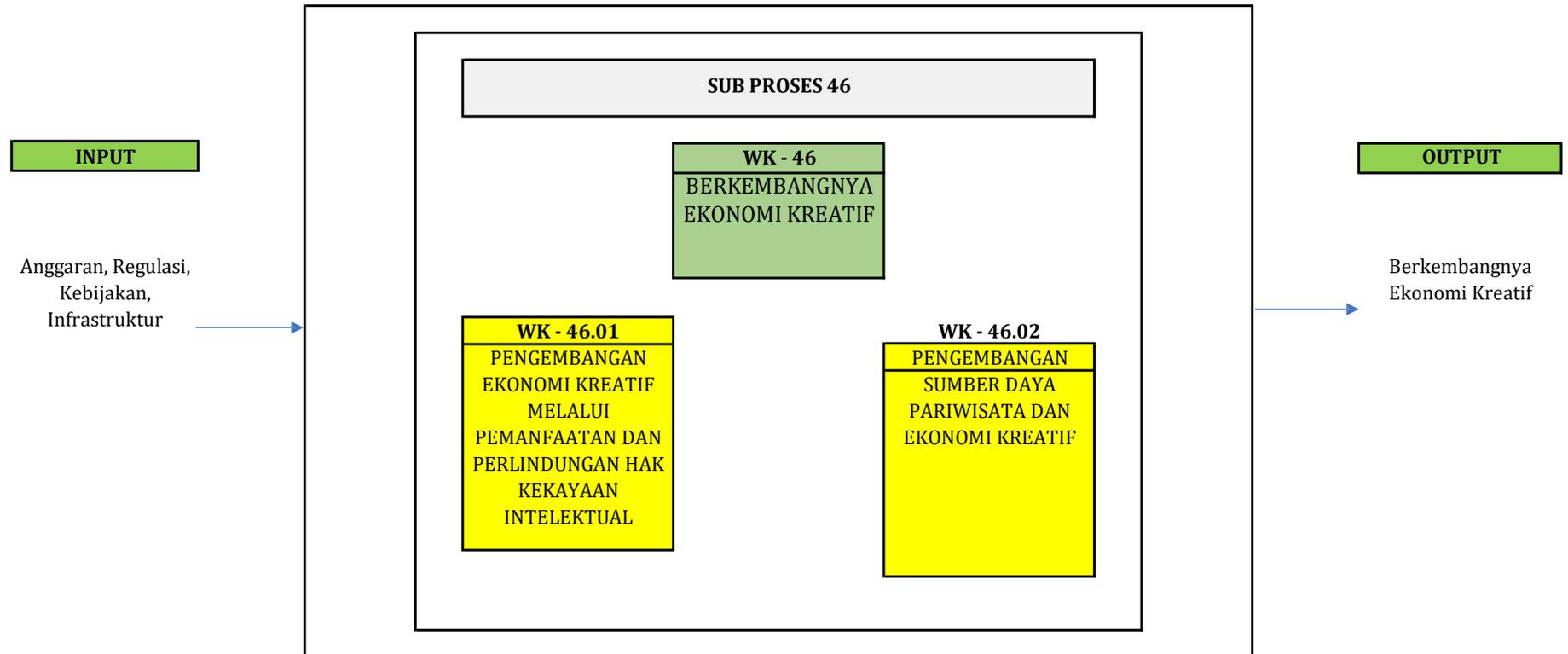


PETA SUB PROSES TUJUAN 4

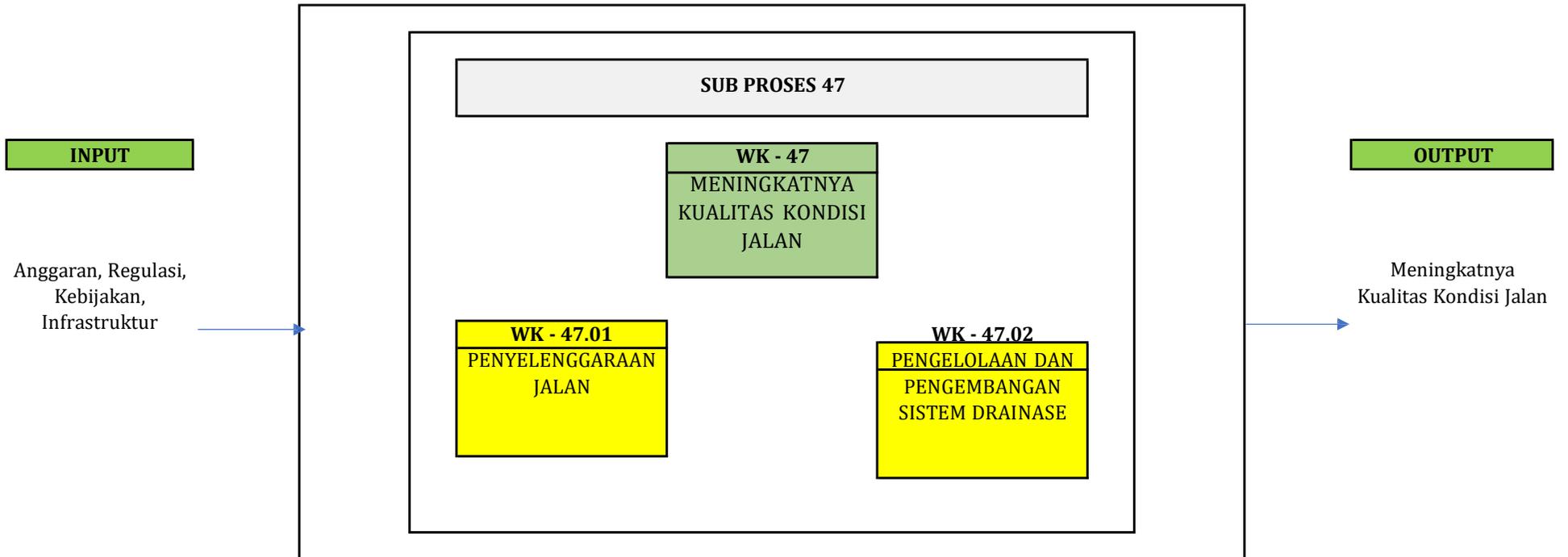


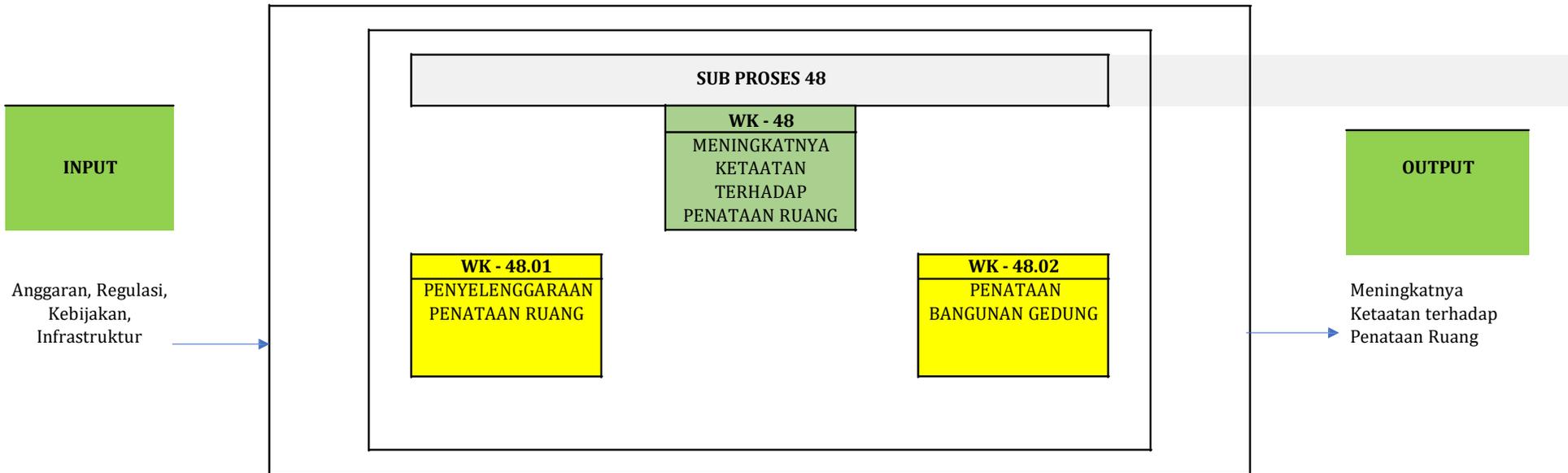


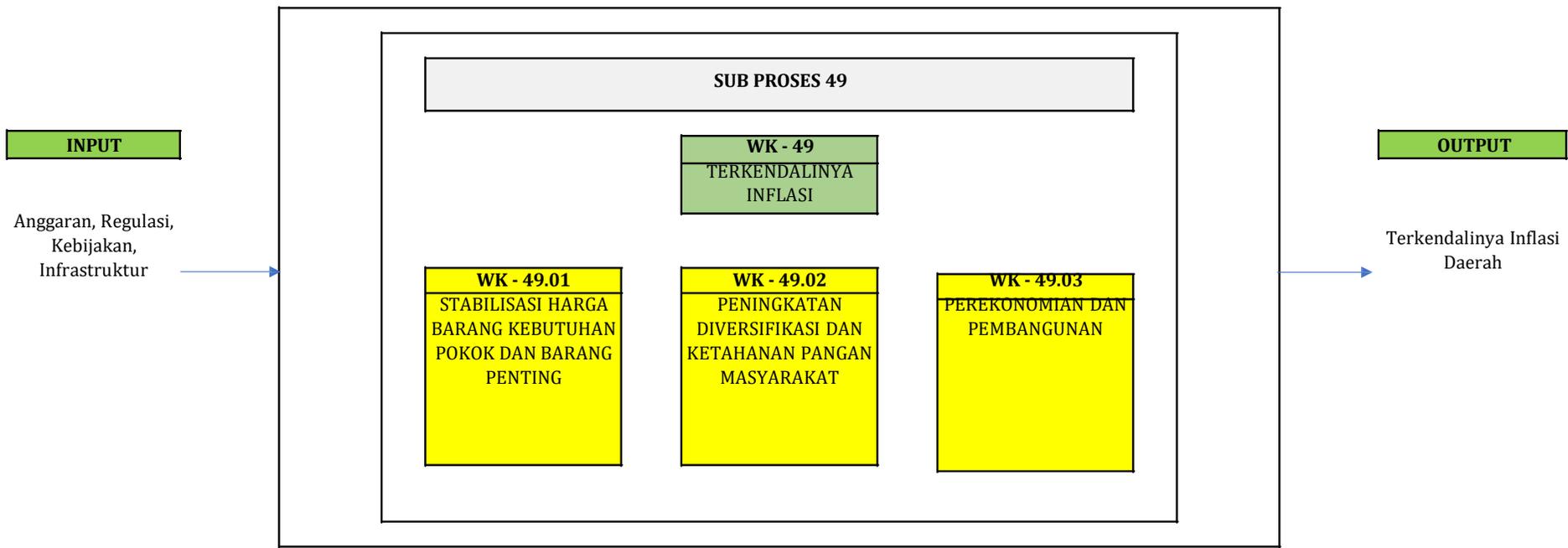
PETA SUB PROSES TUJUAN 4



PETA SUB PROSES TUJUAN 4







PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

WK - 01.01 CFM 01

Bappeda dan Bag. Adhans	Menyiapkan data terkait Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas	mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Diskominfo, Bagian Hukum BPKAD		Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah		
Seluruh OPD					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
Inspktorat						Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

WK - 01.02 CFM 01

Bappeda dan Bag. Adhbang	Menyiapkan data terkait Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		
Bagian Hukum		Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah				
Distominfo, BPKAD						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
Seluruh OPD							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan
Inspektorat							Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

WK - 01.03 CFM 01

Bappeda, Bag. Admbang Dan Bag. Adm. Perekonomian	Menyiapkan data terkait Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan			
Diskominf, BPKAD			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan				
Seluruh OFD					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		
Inspektorat						Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan	

Pengelolaan Keuangan Daerah

WK - 02.01 CFM 01

BPKAD	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Keuangan Daerah				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah			
Bappeda, Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah				
Seluruh OPD						mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	
Inspektorat							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah

WK - 02.02 CFM 01

BPKAD	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Barang Milik Daerah				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah			
Bappeda, Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah				
Seluruh OPD						mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	
Inspektorat							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

WK - 03.01 CFM 01

BAPPEDA	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah		Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah		mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah		
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah					
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah			
Seluruh OPD						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah	
Inspektorat						Mengawasi penegakan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah	

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

WK - 03.02 CFM 01

BAPPEDA	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Pendapatan Daerah		Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah		mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah		
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pendapatan Daerah					
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah			
Seluruh OPD						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah	
Inspektorat						Mengawasi penegakan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Pendapatan Daerah	

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

WK - 03.03 CFM 01

Dinas IINDAG, Bagian Adm. Perekonomian	Menyiapkan data terkait Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali						
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali				
Bagian Hukum					Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali		
Bagian Hukum dan DPMPTSP					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali		
Seluruh Peringkat Daerah							melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan yang optimal dan Inflasi yang terkendali

PELAYANAN PENANAMAN MODAL

WK - 04.01 CFM 01

DPMP/TSP	Menyiapkan data terkait Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bagian Perencanaan		Menyusun bahan kebijakan Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha		Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha penerapan regulasi	
Bappeda, Disperindag						
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha penerapan regulasi kebijakan Inovasi		

PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

WK - 04.02 CFM 01

DINKES	Menyiapkan data terkait pelayanan kesehatan (PMDN)					melaksanakan kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bagian Kesra		Menyusun bahan kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan	
Bappeda				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan		
Bagian Hukum						

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

WK - 04.02 CFM 01

DINKES	Menyiapkan data terkait pelayanan kesehatan (PMDN)					melaksanakan kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bagian Kesra		Menyusun bahan kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan	
Bappeda				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan		
Bagian Hukum						

REHABILITASI SOSIAL

WK - 04.04 CFM 01

DINSOS	Menyiapkan data PMKS					melaksanakan kebijakan menurunkan PMKS
		Menyusun bahan kebijakan Inovasi peningkatan pelayanan kesehatan Menyusun bahan kebijakan menurunkan PMKS	Membahas bahan draft kebijakan menurunkan PMKS		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan menurunkan PMKS	Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bappeda						
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan menurunkan PMKS		

PENEMPATAN TENAGA KERJA

WK - 04.05 CFM 01

DISNAKERTRANS	Menyiapkan data Tenaga Kerja					melaksanakan kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	
Bappeda, DINDIK, DISPERINDAG				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas		
Bagian Hukum						

PENDAFTARAN PENDUDUK

WK - 04.06 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENCATATAN SIPIL

WK - 04.07 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

WK - 04.08 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

WK - 04.02 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

WK - 04.10 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

WK - 04.12 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

WK - 04.1313 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

WK - 04.1414 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

WK - 05.01 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

WK - 05.02 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

WK - 05.03 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

WK - 06.01 CFM 01

DUKCAPIL	Menyiapkan data Administrasi kependudukan Tenaga Kerja					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi				
Bappeda, Diskominfo		Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel Inovasi Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah						Melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

WK - 06.22 CFM 01

BKPSDM	Menyiapkan data terkait Sumber Daya Aparatur Tenaga Kerja				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur	
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur				
BKPSDM, BKD dan BKO Organisasi			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur	

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

WK - 06.33 CFM 01

BKPSDM	Menyiapkan data terkait Sumber Daya Aparatur Tenaga Kerja				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur	
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur				
BKPSDM, BKD dan BKO Organisasi			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur	

PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

WK - 07.01 CFM 01

BKPSDM	Menyiapkan data terkait Sumber Daya Aparatur Tenaga Kerja				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur	
		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur				
BKPSDM, BKD dan BKO Organisasi			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Perangkat Daerah					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan kompetensi dan profesionalitas aparatur	

INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

WK - 08.01 CFM 01

Diskominfo	Menyiapkan data Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai					
Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi		Menyusun bahan kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	
Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai		
Seluruh SKPD					melaksanakan kebijakan Kinerja Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	

PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

WK - 08.02 CFM 01

Diskominfo	Menyiapkan data Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai					
Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi		Menyusun bahan kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	
Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai		
Seluruh SKPD					melaksanakan kebijakan Kinerja Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	

APLIKASI INFORMATIKA

WK - 09.01 CFM 01

Diskominfo	Menyiapkan data Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai					
Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi		Menyusun bahan kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	
Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai		
Seluruh SKPD					melaksanakan kebijakan Kinerja Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	

PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

WK - 10.01 CFM 01

Diskominfo	Menyiapkan data Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai					
Diskominfo, Bappeda, Bagian Organisasi		Menyusun bahan kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	
Diskominfo			Membahas bahan draft kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai		
Seluruh SKPD					melaksanakan kebijakan Kinerja Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Memadai	

PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

WK - 10.02 CFM 01

Bappeda, Bagian TAPEM	Menyiapkan data terkait Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah	Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah			
Diskominfo, BPKAD							
Perangkat Daerah						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah	
Inspektorat							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah

PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

WK - 10.03 CFM 01

	Menyiapkan data pengarusutamaan gender					melaksanakan kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender
DP3AKB		Menyusun bahan kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender	
Bagian Kesra			Membahas bahan draft kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender			
Bappeda Perangkat Daerah				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan meningkatkan pengarusutamaan gender		
Bagian Hukum						

PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

WK - 10.04 CFM 01

Dukcapil	Menyiapkan data Administrasi kependudukan					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	
Bappeda, Dukcapil			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Seluruh SKPD						mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

WK - 10.05 CFM 01

Dukcapil	Menyiapkan data Administrasi kependudukan					mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun draft bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	
Bappeda, Dukcapil			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penyusunan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel		
Seluruh SKPD						mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel

PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

WK - 33.01 CFM 01

Satpol PP	Menyiapkan data terkait Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum					
		Menyusun bahan kebijakan				
Bagian Adm. Kesra		Inovasi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum				
			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum			
Bappeda						
Korinfo						
Dinas Kominfo						
				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
Bagian Hukum						
						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

WK - 35.01 CFM 01

Dinas Ketahanan Pangan	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan					
Bagian Adm. Pembangunan						Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan		melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
Bappeda								
Dinas Kom info					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan			
Bagian Hukum								

PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

WK - 35.02 CFM 01

Dinas Ketahanan Pangan	Menyiapkan data terkait Peningkatan Diversifikasi dan Keatahanan Pangan Masyarakat	Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Diversifikasi dan Keatahanan Pangan Masyarakat	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Diversifikasi dan Keatahanan Pangan Masyarakat			melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Peningkatan Diversifikasi dan Keatahanan Pangan Masyarakat	
Bagian Adm. Pembangunan					Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Diversifikasi dan Keatahanan Pangan Masyarakat		
Bappeda							
Dinas Kom info					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Diversifikasi dan Keatahanan Pangan Masyarakat		
Bagian Hukum							

PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

WK - 35.03 CFM 01

Dinas Ketahanan Pangan	Menyiapkan data terkait Penanganan Kerawanan Pangan					
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Penanganan Kerawanan Pangan			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Penanganan Kerawanan Pangan	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penanganan Kerawanan Pangan
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Penanganan Kerawanan Pangan			
Dinas Kominfo						
Dinas Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Penanganan Kerawanan Pangan		

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

WK - 35.04 CFM 01

Dinas Ketahanan Pangan	Menyiapkan data terkait Pengawasan Kamanan Pangan					
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengawasan Kamanan Pangan			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan Kamanan Pangan	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengawasan Kamanan Pangan
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengawasan Kamanan Pangan			
Dinas Korminfo						
Dinas Korminfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan Kamanan Pangan		
Bagian Hukum						

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

WK - 36.01 CFM 01

Dinas TPHP	Menyiapkan data terkait Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengembangan Sarana Pertanian			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Sarana Pertanian	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengembangan Sarana Pertanian			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Sarana Pertanian		
Bagian Hukum						

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

WK - 36.02 CFM 01

Dinas TPHP	Menyiapkan data terkait Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian		
Bagian Hukum						

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

WK - 36.03 CFM 01

Dinas TPHP	Menyiapkan data terkait Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengembangan Prasarana Pertanian			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Prasarana Pertanian	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengembangan Prasarana Pertanian			
Dinas Kominfo						
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Prasarana Pertanian		
Bagian Hukum						

PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

WK - 36.04 CFM 01

Dinas PUPR	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)			
Dinas Kominfo						
Dinas Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)		

STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

WK - 36.05 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting					
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			
Dinas Kominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting		
Bagian Hukum						

PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

WK - 36.06 CFM 01

Dinas TPHP	Menyiapkan data terkait Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				
Dinas Kom info							
Dinas Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner			
					Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

PENGLOLAAN BUDIDAYA PERIKANAN

WK - 36.07 CFM 01

Dinas Perikanan	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Budaya Perikanan					
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengelolaan Budaya Perikanan	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengelolaan Budaya Perikanan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Budaya Perikanan	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Budaya Perikanan
Bappeda						
Dinas Kominfo						
Dinas Korpri				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Budaya Perikanan		
Bagian Hukum						

PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

WK - 36.08 CFM 01

Dinas Perikanan	Menyiapkan data terkait Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan					
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan			
Dinas Kominfo						
Dinas Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

WK - 36.09 CFM 01

Dinas Perikanan	Menyiapkan data terkait Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
Bappeda							
Dinas Kominfo					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan		
Bagian Hukum							

PENYULUHAN PERTANIAN

WK - 36.10 CFM 01

Dinas Perikanan	Menyiapkan data terkait Penyuluhan Pertanian					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penyuluhan Pertanian	
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Penyuluhan Pertanian	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Penyuluhan Pertanian		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Penyuluhan Pertanian		
Bappeda							
Dinas Kominfo							
Dinas Kominfo					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Penyuluhan Pertanian		
Bagian Hukum							

PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

WK - 37.01 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Perencanaan dan Pembangunan Industri					
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Perencanaan dan Pembangunan Industri			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Perencanaan dan Pembangunan Industri	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Perencanaan dan Pembangunan Industri
Bagian Hukum Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Perencanaan dan Pembangunan Industri			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Perencanaan dan Pembangunan Industri		

PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

WK - 37.02 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Fasilitas Pengembangan Industri					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Fasilitas Pengembangan Industri
Bagian Adm. Kesra		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Fasilitas Pengembangan Industri	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Fasilitas Pengembangan Industri		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Fasilitas Pengembangan Industri	
Bagian Hukum Bappeda				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Fasilitas Pengembangan Industri		
Bagian Hukum						

PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

WK - 37.03 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Pengendalian Izin usaha Industri					
Bagian Adm. Kesra		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengendalian Izin usaha Industri			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian Izin usaha Industri	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengendalian Izin usaha Industri
Bagian Hukum Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengendalian Izin usaha Industri	Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian Izin usaha Industri		
Bagian Hukum						

PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

WK - 37.04 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Pengelolaan Sistem Informasi Industri					
		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengelolaan Sistem Informasi Industri
Bagian Adm. Kesra			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri			
Bappeda, Diskominfo				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Sistem Informasi Industri		
Bagian Hukum						

PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

WK - 38.01 CFM 01

Dinas PUPR	Menyiapkan data terkait Pengembangan Jasa Konstruksi					
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengembangan Jasa Konstruksi			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Jasa Konstruksi	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengembangan Jasa Konstruksi
Bagian Hukum Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengembangan Jasa Konstruksi			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan Jasa Konstruksi		

PENGEMBANGAN EKSPOR

WK - 39.01 CFM 01

Dinas Perindag	Perencanaan, penyusunan Bahan dan undangan	Rapat Pembahasan	Verifikasi	Penyelenggaraan Eskpor	Penyusunan Laporan	Pengawasan	
Perangkat Daerah							
Bappeda							
Inspektorat							

PENGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

WK - 39.02 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		

PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

WK - 39.03 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

WK - 39.4 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Perizinan, Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		

PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

WK - 39.5 CFM 01

Dinas Perindag	Menyiapkan data terkait Standarisasi dan Perlindungan Konsumen					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	
Bagian Hukum Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Standarisasi dan Perlindungan Konsumen		

PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

WK - 40.01 CFM 01

Dinas Perhubungan	Menyiapkan data terkait Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Menyusun bahan kebijakan Inovasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
Bagian Adm. Pembangunan						
Bappeda						
Bagian Hukum						

MENINGKATNYA USAHA PARIWISATA

WK - 41.01 CFM 01

Dinas Porapar	Menyiapkan data terkait Pariwisata					
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata		

PEMASARAN PARIWISATA

WK - 41.02 CFM 01

Dinas Porapar	Menyiapkan data terkait Pemasaran Pariwisata	Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pemasaran Pariwisata	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pemasaran Pariwisata	Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pemasaran Pariwisata	Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pemasaran Pariwisata	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pemasaran Pariwisata
Bagian Adm. Perekonomian						
Bappeda						
Bagian Hukum						

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

WK - 41.03 CFM 01

Dinas Porapar	Menyiapkan data terkait Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		

PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

WK - 42.01 CFM 01

Dinas Koperasi dan UMKM	Menyiapkan data terkait Usaha Simpan Pinjam					
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam	melaksanakan kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam
Bappeda, Disporapar, DISPERINDAG			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Usaha Simpan Pinjam		

PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

WK - 42.02 CFM 01

Dinas Koperasi dan UMIK	Menyiapkan data terkait Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	melaksanakan kebijakan Inovasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Bappeda, Disporapar, DISPERINDAG			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		

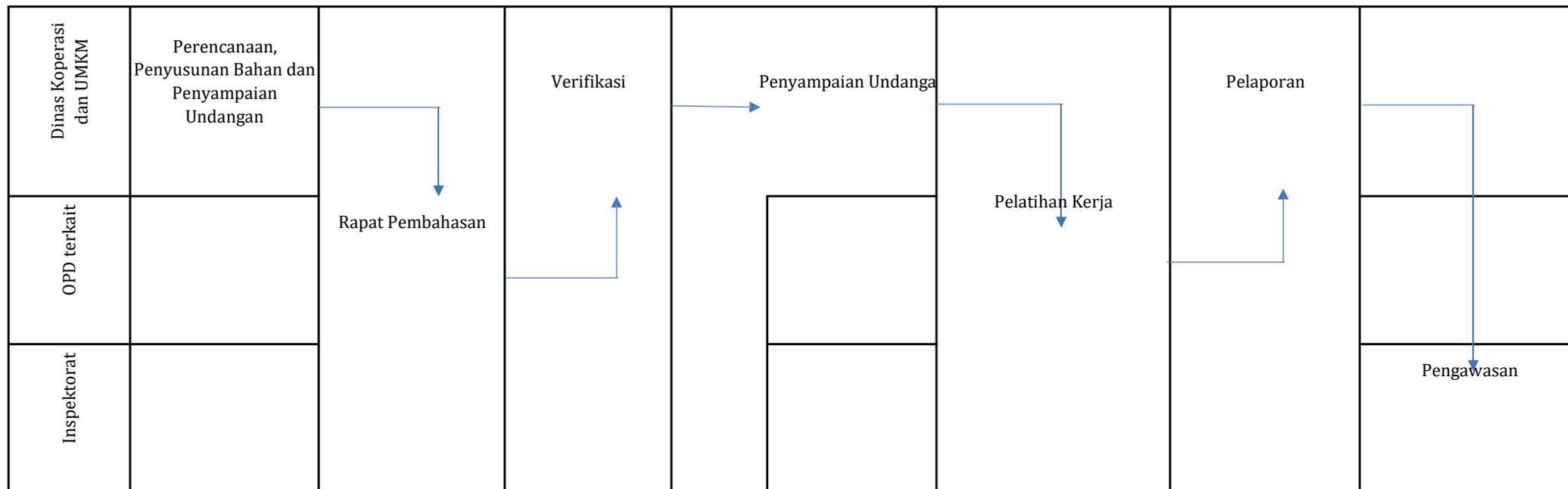
PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

WK - 42.03 CFM 01

Dinas Koperasi dan UMKM	Menyiapkan data terkait Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Menyusun bahan kebijakan Inovasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi			melaksanakan kebijakan Inovasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
Bagian Adm. Perekonomian					Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
Bappeda, Disporapar, DISPERINDAG					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		
Bagian Hukum							

PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

WK - 42.04 CFM 01



PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

WK - 43.01 CFM 01

Dinas Koperasi dan UMKM	Menyiapkan data terkait UMKM						
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi UMKM	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan UMKM				
Bappeda, Disporapar, DISPERINDAG							
Bagian Hukum					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan UMKM		
						Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan UMKM	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan UMKM

PENGEMBANGAN UMKM

WK - 43.02 CFM 01

Dinas Koperasi dan UMKM	Menyiapkan data Pengembangan UMKM					
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Pengembangan UMKM			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan UMKM	melaksanakan kebijakan Inovasi Pengembangan UMKM
Bappeda, Disporapar, DISPERINDAG			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Pengembangan UMKM			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Pengembangan UMKM		

PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

WK - 43.03 CFM 01

Bappeda, Bag. Adhbang. Dan Bag. Adm. Perekonomian	Menyiapkan data terkait Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan				mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		
Bagian Hukum		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan			
Diskominfo, BPKAD			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan				
Seluruh OPD						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan	
Inspektorat							Mengawasi pelaksanaan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

WK - 44.1 CFM 01

DPMPTSP	Menyiapkan data terkait Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha	
Bappeda, DISPERINDAG			Menyusun bahan kebijakan Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Kemudahan Berusaha		

PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

WK - 44.2 CFM 01

DPMPTSP	Menyiapkan data terkait Pengembangan Iklim Penanaman Modal					
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan dalam Pengembangan Iklim Penanaman Modal			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal	melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal
Bappeda, DISPERINDAG			Menyusun bahan kebijakan dalam Pengembangan Iklim Penanaman Modal			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan untuk Pengembangan Iklim Penanaman Modal		

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

WK - 44.03 CFM 01

DPMPTSP	Menyiapkan data terkait Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal					melaksanakan kebijakan Inovasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	
Bappeda, DISPERINDAG			Menyusun bahan kebijakan dalam Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan untuk Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		

PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

WK - 44.04 CFM 01

<p>DPMP/TSP</p>	<p>Menyiapkan data terkait Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal</p>	<p>Menyusun bahan kebijakan dalam Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal</p>			<p>Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal</p>	<p>melaksanakan kebijakan Inovasi Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal</p>
<p>Bagian Adm. Perekonomian</p>		<p>Menyusun bahan kebijakan dalam Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal</p>	<p>Menyusun bahan kebijakan dalam Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal</p>		<p>Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal</p>	
<p>Bappeda, Diskominfo, DISPERINDAG</p>			<p>Menyusun bahan kebijakan dalam Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal</p>	<p>Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan untuk Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal</p>		
<p>Bagian Hukum</p>				<p>Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan untuk Pengelolaan Data dan Sistem Infomasi Penanaman Modal</p>		

PENGELOLAAN IZIN LOKASI

WK - 44.05 CFM 01

DPMPTSP	Menyiapkan data terkait Izin Lokasi					melaksanakan kebijakan Inovasi Izin Lokasi
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan dalam Izin Lokasi			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Izin Lokasi	
Bappeda, DISPERINDAG			Menyusun bahan kebijakan dalam Pengelolaan Izin Lokasi			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Izin Lokasi		

PERENCANAAN TENAGA KERJA

WK - 45.01 CFM 01

Dinas Nakertrans	Menyiapkan data Tenaga Kerja					
		Menyusun bahan kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas	melaksanakan kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas
Bagian Adm. Perekonomian			Membahas bahan draft kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas			
Bappeda, DINDIK, DISPERINDAG				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Meningkatnya Tenaga Kerja yang Berkualitas		
Bagian Hukum						

PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

WK - 45.02 CFM 01

Dinas Nakertrans	Perencanaan, Penyusunan Bahan dan Penyampaian Undangan	Rapat Pembahasan	Verifikasi		Penyampaian Undangan	Pelatihan Tenaga Kerja	Pelaporan
OPD terkait							
Inspektorat							

```

    graph TD
      A[Perencanaan, Penyusunan Bahan dan Penyampaian Undangan] --> B[Rapat Pembahasan]
      B --> C[Verifikasi]
      C --> D[Penyampaian Undangan]
      D --> E[Pelatihan Tenaga Kerja]
      E --> F[Pelaporan]
      F --> B
      F --> C
  
```

PENEMPATAN TENAGA KERJA

WK - 45.03 CFM 01

Dinas Nakertrans	Perencanaan, Penyusunan Bahan dan Penyampaian Undangan	<pre> graph TD RP[Rapat Pembahasan] --> V[Verifikasi] V --> PU[Penyampaian Undangan] PU --> PTK[Penempatan Tenaga Kerja] PTK --> P[Pelaporan] </pre>	Verifikasi		Penyampaian Undangan	Penempatan Tenaga Kerja	Pelaporan		
OPD terkait			Rapat Pembahasan						
Inspektorat									

HUBUNGAN INDUSTRIAL

WK - 45.04 CFM 01

Dinas Nakertrans	Menyiapkan data Hubungan Industrial	Penyusunan Regulasi Daerah dibidang Hubungan Industrial	Penyusunan Juklak dan Juknis		Identifikasi Masalah HI		Pencegahan Perselisihan HI		Monev HI		
Bagian Kesra											
Bagian Hukum											
Perusahaan/ Badan Usaha											
Serikat Pekerja											

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

WK - 46.01 CFM 01

Dinas Porapar	Menyiapkan data terkait Pariwisata					melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata
Bagian Adm. Perekonomian		Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata			Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata			
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata		

PENYELENGGARAAN JALAN

WK - 47.01 CFM 01

Dinas PUPR	Menyiapkan data kondisi Infrastruktur Jalan		Membahas bahan draft kebijakan peningkatan infrastruktur jalan				melaksanakan kebijakan peningkatan infrastruktur jalan
Bagian Adm. Pembangunan		Menyiapkan data kondisi Infrastruktur Jalan				Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan peningkatan infrastruktur jalan	
Bappeda					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan peningkatan infrastruktur jalan		
Bagian Hukum					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Infrastruktur Jalan		
Dinas Perkimtah							
Dinas Perhubungan							

PENGLOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

WK - 47.02 CFM 01

Dinas PUPR	Menyiapkan data kondisi Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase						melaksanakan kebijakan peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
Bagian Adm Pembangunan		Menyiapkan data kondisi IPengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase				Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase			
Dinas Perkimtah							
Dinas Perhubungan							



Dinas PUPR	Menyiapkan data Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang					melaksanakan kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Membahas bahan draft kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang				
Bappeda					Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
Bagian Hukum					Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
dinas Perkimtah							

PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

WK - 48.02 CFM 01

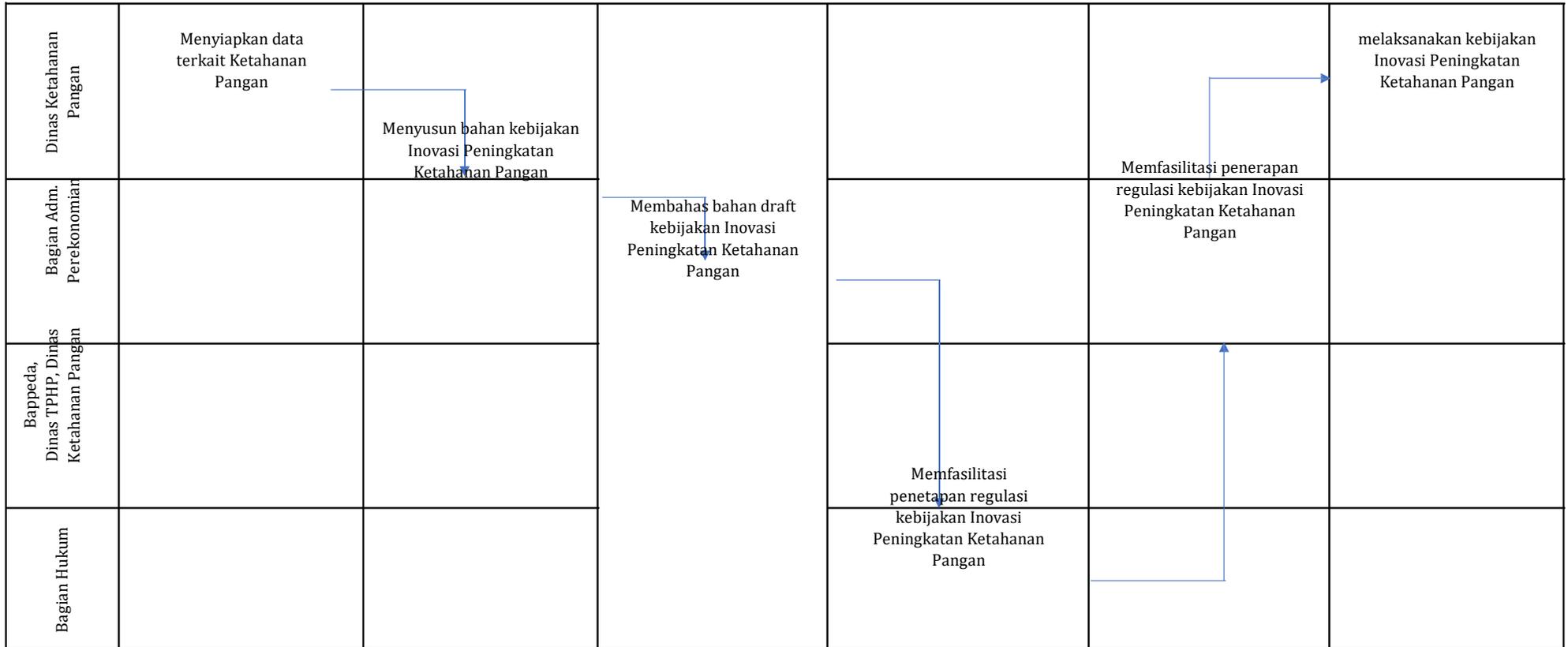
Dinas PUPR	Menyiapkan data Penataan Bangunan Gedung					melaksanakan kebijakan Perencanaan dan Pengendalian Penataan Bangunan Gedung
Bagian Adm. Pembangunan		Menyusun bahan kebijakan Penataan Bangunan Gedung				
Bappeda			Membahas bahan draft kebijakan Penataan Bangunan Gedung		Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Penataan Bangunan Gedung	
Bagian Hukum				Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Penataan Bangunan Gedung		
dinas Perkimtah						

```

    graph TD
      PUPR[Dinas PUPR: Menyiapkan data Penataan Bangunan Gedung] --> Adm[Bagian Adm. Pembangunan: Menyusun bahan kebijakan Penataan Bangunan Gedung]
      Adm --> Bappeda[Bappeda: Membahas bahan draft kebijakan Penataan Bangunan Gedung]
      Bappeda --> Hukum[Bagian Hukum: Memfasilitasi penetapan regulasi kebijakan Penataan Bangunan Gedung]
      Hukum --> PUPR
      Bappeda --> PUPR
      Hukum --> PUPR
      PUPR --> Perkimtah[dinas Perkimtah]
      PUPR --> Adm
      PUPR --> Bappeda
      PUPR --> Hukum
      PUPR --> Perkimtah
  
```



Dinas TPHP, Dinas Ketahanan Pangan	Perencanaan, Penyusunan Bahan, dan Undangan	Rapat Pembahasan	Verifikasi	Penataan Stabilitas Harga	Penyusunan Laporan	
OPD terkait						
Bagian Hukum						
Insektorat						Pengawasan



PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

WK - 49.03 CFM 01

Bappeda dan Bag. Adm. Perekonomian	Menyiapkan data terkait Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan	Menyusun bahan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan	Membahas bahan draft kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan	Memfasilitasi penerapan regulasi kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan	mensosialisasikan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan		
Bagian Hukum							
Diskominfo BPKAD							
OPD						melaksanakan kebijakan Inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan	
Seluruh							Mengawasi pelaksanaan kebijakan inovasi Peningkatan Koordinasi Dan Sinkronisasi Perekonomian dan Pembangunan
Inspektorat							